

Schemata

JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM

Mariawati, Ahyar Rosidi, Yulia Maliza

Pengembangan Alat Permainan Edukatif Berbasis Permainan Tradisional dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022

Muliani, Ismail, Muh. Saleh

Keterlibatan Politik Tuan Guru dalam Pengelolaan Pondok Pesantren di Lombok Utara (Multi Kasus)

Lalu Sumardi, M. Ismail, Rispawati

BEGURU: Menggali Prinsip-Prinsip Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kearifan Lokal Sasak

Rahmansyah Abdul Shomad, Guruh Sugiharto

Analisis 5C terhadap Keputusan Pembiayaan Musyarakah PT. Gerbang NTB Emas melalui Bank NTB Syariah pada Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB

Sri Wahyuni

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Schemata

JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM Volume 11, Nomor 1, Juni 2022

Editorial Team

Penanggung Jawab : Fahrurrozi (Direktur Pascasarjana UIN Mataram)

Redaktur : Afif Ikhwanul Muslimin (UIN Mataram)

Penyunting :

- Masnun Tahir, UIN Mataram, Indonesia
- Adi Fadli, UIN Mataram, Indonesia
- Abdun Nasir, UIN Mataram, Indonesia
- Suprpto, UIN Mataram Indonesia
- Mohammad Liwa Irrubai, UIN Mataram, Indonesia
- Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, UIN Tulungagung, Indonesia
- Ismail Suardi Wekke, STAIN Sorong, Indonesia
- Teuku Zulfikar, UIN Ar-Raniry Aceh, Indonesia
- Like Raskova Octaberlina, UIN Malang, Indonesia
- Dwi Fita Heriyawati, Islamic University of Malang, Indonesia
- Abdul Gafur Marzuki, IAIN Palu
- Atun Wardatun, UIN Mataram, Indonesia

Penyunting Internasional:

- Biyanka Smith, University of Melbourne, Australia
- Aslam Khan Bin Samash Kahn, ERICAN University, Malaysia
- Yuta Otake, RELO, United State of America
- Yousf Faraj Muhammad, Libya

Sekretariat : Rina Sari

Alamat Redaksi:

Pascasarjana UIN Mataram

Jln. Gajah Mada No.100 Jempong Baru, Mataram, NTB, Indonesia

Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337)

Website: <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>

email: schemata@uinmataram.ac.id

Schemata

JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM
Volume 11, Nomor 1, Juni 2022

Daftar Isi

- | | | |
|-------|---|--|
| 1-22 | ∏ | Mariawati, Ahyar Rosidi, Yulia Maliza
Pengembangan Alat Permainan Edukatif Berbasis Permainan Tradisional dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022 |
| 23-38 | ∏ | Muliani, Ismail, Muh. Saleh
Keterlibatan Politik Tuan Guru dalam Pengelolaan Pondok Pesantren di Lombok Utara (Multi Kasus) |
| 39-54 | ∏ | Lalu Sumardi, M. Ismail, Rispawati
BEGURU: Menggali Prinsip-Prinsip Penyiapkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kearifan Lokal Sasak |
| 55-68 | ∏ | Rahmansyah Abdul Shomad, Guruh Sugiharto
Analisis 5C terhadap Keputusan Pembiayaan Musyarakah PT. Gerbang NTB Emas melalui Bank NTB Syariah pada Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB |
| 69-88 | ∏ | Sri Wahyuni
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat |

Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram is a scientific, peer-reviewed and open-access journal published by State Islamic Religious Institute (IAIN) Mataram which in 2017 upgraded its status to be Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. The journal maintain collaboration with Asosiasi Dosen Bahasa Inggris PTKIN/IS se Indonesia (ELITE Association) and ASKOPIS (Asosiasi Jurusan KPI Se-Indonesia). The journal publishes and disseminates the ideas and researches on Interdisciplinary Islamic Studies in primary, secondary or undergraduate level.



Alamat Redaksi:

Pascasarjana UIN Mataram

Jln. Gajah Mada No.100 Jempong Baru, Mataram, NTB, Indonesia

Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337)

Website: <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>

email: schemata@uinmataram.ac.id

Pengembangan Alat Permainan Edukatif Berbasis Permainan Tradisional dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022

Mariawati¹, Ahyar Rosidi², Yulia Maliza³

^{1,2} STITNU Al Mahsuni, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

³ PAUD Kb. Nurul Yaqin, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

email: ¹mariawati729@gmail.com, ²ahyarrasyidi24434@gmail.com, ³yuliamaliza222@gmail.com

ABSTRACT

This is developmental research using the Borg & Gall model. The purpose of this research is to develop traditional game-based educational game tools (APE) in increasing children's creativity in group B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Pringgasela Village in the 2021/2022 Learning Year. The results showed that the assessment of the APE stilt product from 2 people, namely the design expert and the material expert, obtained an average score of 3.96 in the category feasible to be tested and 4.2 in the category very feasible to be tested. As for the small group test from the validation of one teacher, the score was 4.25 and 4.42, respectively. Thus, APE stilts have very decent validity. As for the assessment of congklak products, 2 people, namely design experts and materials experts, obtained an average score of both 4.08 and 4.2. with a very worthy category tested. Meanwhile, there is an increase in children's creativity from the stilt game, namely in the first week it produces an average of six aspects of creativity, namely 5 in the starting to develop category, while in congklak there are 4 aspects with the category starting to develop and 3 aspects of creativity being in the category of needing intervention for stilt games and category develops in the Congklak game. In the second week, there are 5 aspects in the developing category and 3 aspects of creativity in the developing category for the game of congklak. While the stilt game produces the five aspects of creativity that fall into the developing category.

Keywords: Development of Educational Game Tools, Traditional Based Games, Children's Creativity.

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model Borg & Gall. Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan alat permainan edukatif (APE) berbasis permainan tradisional dalam meningkatkan kreativitas anak di kelompok B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian produk APE egrang dari 2 orang yaitu ahli desain dan ahli materi memperoleh skor rata-rata 3,96 dengan kategori layak diujicobakan dan 4,2 dengan kategori sangat layak diujicobakan. Sedangkan untuk uji kelompok kecil dari validasi salah satu guru memperoleh nilai berturut-turut 4,25, dan 4,42. Dengan demikian APE egrang memiliki validitas sangat layak. Sedangkan untuk penilaian produk congklak dari 2 orang yaitu ahli desain dan ahli materi memperoleh skor rata-rata keduanya 4,08 dan 4,2. dengan kategori sangat layak diujicobakan. Sementara, terdapat peningkatan kreativitas anak dari permainan egrang yaitu pada minggu pertama menghasilkan rata-rata keenam aspek kreativitas yaitu 5 pada kategori mulai berkembang sedangkan pada congklak berada pada 4 aspek dengan kategori mulai berkembang dan 3 aspek kreativitas berada pada kategori perlu intervensi untuk permainan egrang dan kategori berkembang pada permainan congklak. Pada minggu kedua yaitu 5 aspek pada kategori berkembang dan 3 aspek kreativitas dengan kategori berkembang untuk permainan congklak. Sedangkan pada permainan egrang menghasilkan kelima aspek kreativitas masuk pada kategori berkembang.

Kata kunci: Pengembangan Alat Permainan Edukatif, Permainan Berbasis Tradisional, Kreativitas Anak.		
<i>Submitted:</i> 4 Feb 2022	<i>Revised:</i> 15 Maret 2022	<i>Accepted:</i> 15 April 2022
<i>Final Proof Received:</i> 29 April 2022	<i>Published:</i> 30 Juni 2022	
<i>How to cite (in APA style):</i> Mariawati, Rosidi, A., & Maliza, Y. (2022). Pengembangan Alat Permainan Edukatif Berbasis Permainan Tradisional dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022. <i>Schemata</i> , 11 (1), 1-22		

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang sangat vital dan merupakan hal yang paling dibutuhkan di era sekarang ini. Hakikat dari pendidikan yakni memanusiakan manusia, dengan tujuan untuk membudayakan manusia. Dalam perkembangan pendidikan era globalisasi di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara semua elemen dalam memaksimalkan proses untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Salah satu elemen dalam mencapai hakikat pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan yang memberikan layanan bagi anak usia dini hingga memasuki tahapan pendidikan dasar. Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah. Sedangkan di Indonesia, umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak (3 bulan sampai 5 tahun) dan kelompok bermain (usia 3 tahun), sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program usia dini¹.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.²

Pendidikan pada usia dini diarahkan untuk mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin sesuai dengan tahapan perkembangan anak melalui kegiatan bermain sambil belajar. Selain itu, usia dini diharapkan juga berusaha untuk mengembangkan segi kepribadian anak dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga kependidikan dalam lingkungan sekolah. Karena pada tahapan ini, anak tidak lagi berkumpul dan bergaul bersama keluarga di rumah namun sudah berkumpul bersama dengan figur baru yaitu guru

¹Patmonodewo. *Pendidikan Anak Prasekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 13

²Standard Pendidikan Anak Usia Dini (PERMENDIKNAS NO.58 TAHUN 2009)

dan teman sebayanya. Anak harus dibimbing untuk memperoleh kemampuan sosial yang berhubungan dengan seni dan kreativitas.³

Selain metode guru dalam meningkatkan perkembangan seni dan kreativitas anak, seorang guru juga harus memerlukan metode pembelajaran yang sesuai untuk anak. Salah satunya adalah dengan penerapan metode bermain, hal ini bertujuan untuk merangsang perkembangan tingkat seni dan kreativitas anak karena bermain merupakan dunia anak, hal ini sesuai pada pernyataan Hurlock dalam Suyanto menyatakan bahwa “masa usia 3-5 tahun merupakan masa permainan. Bermain sebagai kegiatan yang mempunyai nilai praktis, artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak”.⁴ Dengan bermain anak akan lebih senang, semangat dan tidak cepat bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.⁵ Kreativitas merupakan bentuk aktivitas imajinatif yang mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat asli/original.⁶ Kreativitas adalah kemampuan untuk berhayal. Misalkan anak berhayal merayakan hari ulang tahunnya, maka dengan sendirinya pikiran yang terbayang adalah roti ulang tahun yang cantik. Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru sesuai imajinasi atau khayalannya.

Dalam menerapkan metode bermain, seorang guru tidak luput dari alat bermain. Pada usia dini sangat dibutuhkan sebuah alat permainan yang memiliki nilai edukasi atau dikenal dengan istilah alat permainan edukatif (APE). APE sangat berperan bagi anak dalam memberikan visualisasi atau peningkatan motorik anak sehingga penggunaan APE pada anak usia dini sangat vital untuk menopang perkembangan anak.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentunya harus memiliki APE, baik itu sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun yayasan swasta. menggunakan APE, anak akan bermain dan bereksplorasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Kegiatan main dan bereksplorasi yang menyenangkan akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama, kemampuan berbahasa, kognitif, motorik, dan sosial emosional, Proses bermain anak identik dengan penggunaan alat permainan. Alat permainan pada dasarnya adalah semua alat bermain yang

³Febrina, F., Harsanto, P. W., & Basuki, R. M. N. (2019). Perancangan Kampanye Sosial Pentingnya Seni dalam Pendidikan Anak. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(14), 9.

⁴Suyanto, S. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005) hal. 72

⁵ Munandar, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, (Jakarta: RinekaCipta, 2021) h.6

⁶ Sumanto, *Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak TK*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005) h.24

digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki sifat seperti bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, mencari padanannya, merangkai, membentuk, menyempurnakan desain, atau menyusun sesuai bentuk utuhnya.

Immawan Muhammad Arif mengatakan alat permainan edukatif ini adalah sarana yang digunakan oleh anak untuk bermain, yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak, jadi APE dapat digunakan anak untuk bermain sambil belajar, artinya APE dan bermain merupakan sarana belajar yang menyenangkan.⁵ Mayke Sugianto mengemukakan bahwa pengertian alat permainan edukatif (APE) adalah alat permainan yang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan. Berkaitan dengan alat permainan untuk anak usia dini maka pengertian APE untuk anak usia dini adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini.⁷

Namun sangat disayangkan keberadaan APE di beberapa PAUD yang berada di pelosok masih kekurangan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan akan APE sebagai penunjang proses pembelajaran di PAUD harus mendapatkan perhatian khusus sehingga kekurangan-kekurangan yang bersifat mendasar khususnya APE sebagai penunjang kreativitas anak dapat terpenuhi.

Kegiatan bermain bagi anak-anak merupakan sarana untuk mencurahkan kegiatan aktif dalam mencapai kesenangan berdasarkan aktivitas yang dilakukannya. Bermain juga memberi efek dalam membangkitkan saraf motorik dan sensoriknya. Beberapa bentuk APE yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain, balok cruissenaire, Puzzle besar, kotak alfabet, kartu lambang bilangan, kartu pasangan, lotto warna, lotto bentuk.

Uswatun Hasanah (2019) mengungkapkan bahwa tujuan dari penggunaan beberapa APE adalah sebagai sarana dalam membantu guru mengembangkan kompetensi anak didik. Akan tetapi, dalam penggunaannya terkadang masih diperhadapkan pada ketidakseimbangan antara jumlah ketersediaan alat permainan khususnya dalam bentuk APE dengan jumlah anak didik yang ada, sehingga diperlukan kemampuan guru yang lebih untuk menyesuaikan antara keterbatasan alat permainan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Karena, tidak menutup kemungkinan tidak maksimalnya pelaksanaan pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikarenakan keterbatasan alat permainan dan kurangnya kemampuan guru dalam mengelola alat permainan yang terbatas. Begitu pula, ketepatan penggunaan APE ini senantiasa menunjang keberhasilan pembelajaran yang mana penggunaannya disesuaikan

⁵ Immawan Muhammad Arif, "Alat Permainan Edukatif *Outdoor* Yang Digunakan Mengembangkan Motorik Kasar Di Tk Se- Kecamatan Wonosari Gunungkidul". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Edisi 8 Tahun ke-5* (Tahun 2016).h.857

⁷ Wulan Adiarti, *Alat Permainan Edukatif Berbahan Limbah Dalam Pembelajaran Sains Di Taman Kanak-Kanak. Lembaran Ilmu Kependidikan Jilid 38, No. 1*(Tahun 2009) h. 8

dengan tingkat perkembangan dan kemampuan setiap anak sehingga dapat berkembang secara maksimal.⁸

Pemanfaatan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) pada pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam usaha pengoptimalan tumbuh kembang mereka. Peranan APE bagi anak usia dini yakni media stimulasi, pembelajaran dan permainan, sedangkan bagi guru merupakan sarana yang membantu dalam penyampaian pembelajaran. Dengan bantuan APE proses pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan, efektif dan efisien.

Pentingnya Alat Permainan Edukatif adalah dapat melatih konsentrasi anak, mengajar dengan lebih cepat, dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu, dapat mengatasi masalah keterbatasan tempat, dapat mengatasi masalah keterbatasan bahasa, dapat membangkitkan emosi manusia, dapat menambah daya pengertian, dapat menambah ingatan murid, dan dalam menambah kesegaran dalam mengajar.

Keterbatasan akan ketersediaan alat permainan yang ada di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) peristiwa senantiasa menjadi perhatian bagi pengelola. Beberapa upaya dilakukan pengelola untuk memenuhi kebutuhan bermain anak dalam bentuk penggalakan kerjasama dengan masyarakat dan beberapa pihak terkait khususnya pengadaan alat permainan. Disamping itu, pengelola juga senantiasa menerapkan sistem pembelajaran inovatif dimana guru diharapkan dapat menggunakan alat dan bahan permainan yang mudah didapat.

Berdasarkan pengamatan yang ada di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam penggunaan APE tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan, akan tetapi pada saat selesai menggunakan alat permainan tersebut, anak juga diharapkan untuk merapikan kembali alat permainan yang digunakannya. balok yang telah dipakainya. Satu per satu anak merapikan baloknya dan mengembalikan ke tempat sebelumnya

Sebelum teknologi masuk, permainan tradisional sangat populer di Indonesia. Di masa lalu, anak-anak bermain dengan alat sederhana, tapi sekarang mereka sudah bermain *game* berbasis teknologi, teknologi yang datang dari luar negeri dan mulai meninggalkan permainan tradisional. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional perlahan mulai dilupakan oleh anak-anak Indonesia, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sama sekali asing dengan permainan tradisional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman saat ini semakin mendorong kemajuan teknologi dalam bidang apapun. Teknologi yang diciptakan tentu di satu sisi dapat membantu memajukan karya manusia, di sisi lain, beberapa efek dapat menyebabkan disfungsi teknologi itu sendiri. Demikian pula kehidupan sosial suatu masyarakat juga akan berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam masa tenggang yang lambat, dan sebaliknya akan mengalami

⁸ Uswatun Hasanah, 'Penggunaan Alat Permainan Edukatif (Ape) Pada Taman Kanak-Kanak Se-Kota Metro', *AWLADY, Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1), h 20-40.

perubahan yang cepat, misalnya pada permainan tradisional untuk anak-anak, saat ini mulai memudar dan tergantikan dengan permainan modern.

Berdasarkan hasil pra observasi pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 yang dilakukan peneliti berupa wawancara dengan beberapa guru PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya bahwa banyak guru sering mengeluhkan minimnya APE di tempat mereka mengajar. Hal ini disebabkan harganya yang relatif tinggi dan hanya mengandalkan pembiayaan dari dana BOP (Bantuan Operasional PAUD). Di samping itu kurangnya kreativitas guru dalam membuat alat-alat permainan yang sederhana. Berdasarkan hal tersebut di atas, kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan adalah mengembangkan Alat Permainan Edukatif (APE) berbasis lokal dengan bernuansa permainan tradisional. Selain itu kurangnya kreativitas peserta didik dikarenakan tidak didukung oleh sarana prasarana yang sesuai/layak sehingga berpengaruh terhadap antusias peserta didik dalam pembelajaran.

Untuk mengatasi permasalahan minimnya alat permainan edukatif, dipandang perlu adanya APE berbasis tradisional pembelajaran yang berguna meningkatkan hasil untuk meningkatkan seni dan kreativitas anak usia dini.

Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak jaman dulu. Kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara kelompok. Kehidupan masyarakat di masa lalu yang bisa dibilang tidak mengenal dunia luar telah mengarahkan dan menuntun mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang tinggi. Terlebih kebudayaan Indonesia pada umumnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Hal ini yang kemudian mendorong terciptanya jenis permainan tradisional. Sayangnya perkembangan jaman khususnya perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat jenis permainan ini perlahan mulai menghilang.⁹ Permainan tradisional sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Selain tidak menghabiskan banyak uang, permainan tradisional sebenarnya sangat baik untuk melatih tubuh dan pikiran anak. Melalui permainan tradisional, anak secara tidak langsung dirangsang oleh kreativitas, ketangkasan, kepemimpinan, kecerdasan dan wawasan. Pada zaman dahulu, permainan tradisional sangat diminati oleh masyarakat. Permainan tradisional tidak hanya sebuah permainan yang dimainkan tetapi juga memiliki nilai budaya yang dapat diambil. Tetapi seiring perkembangan zaman, dengan masuknya budaya luar ke budaya sendiri menjadikan krisis budaya bagi budaya sendiri. Dengan masuknya budaya luar, disadari bahwa hal itu menggeser minat masyarakat akan budaya daerahnya, bahkan berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional masing-masing daerah.

Egrang merupakan permainan tradisional yang cukup terkenal di berbagai wilayah di nusantara, tidak terkecuali melayu. Egrang merupakan salah satu permainan tradisional yang

⁹ Soesanto, Pengertian dan Macam Permainan Tradisional Berbagai Daerah
<https://antoksoesanto.blogspot.com/2014/08/pengertian-dan-macam-permainan-tradisional.html>,
dikunjungi pada tanggal 2 Januari 2022

terkenal pada masyarakat monggak. Permainan Egrang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh saat menaikinya. Egrang terbuat dari 2 batang bambu atau kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Pemain berdiri di atasnya untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Pemain yang bisa sampai ke garis finish pertama kali tanpa jatuh, akan menjadi pemenang.

Salah satu egrang yang sederhana terbuat dari tempurung kelapa. Egrang Tempurung Kelapa tidak memerlukan tempat (lapangan) yang khusus, dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Dapat dimainkan di tepi pantai, di tanah lapang, atau di tepian jalan. Permainan tradisional ini hanya memerlukan arena seluas 7- 15 meter dengan lebar 3- 4 meter.

Permainan ini dapat dilakukan oleh pria dan wanita dengan memakai pakaian olah raga yang pantas. Permainan Egrang Tempurung Kelapa dapat dikategorikan sebagai permainan anak-anak. Bila permainan berupa adu kecepatan (lomba lari), permainan ini diawali dengan berdirinya 3-4 pemain di garis *start* sambil menaiki bambu/alat permainan masing-masing. Bagi pemain yang kurang tinggi atau sebagai pemain egrang pemula, mereka dapat menaikinya dari tempat yang agak tinggi atau menggunakan tangga dan baru berjalan ke arah garis *start*. Jika telah siap, orang lain yang tidak ikut bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Mendengar aba-aba itu, para pemain akan berlari menuju garis *finish*. Pemain yang lebih dahulu mencapai garis *finish* dinyatakan sebagai pemenangnya.¹⁰

Adapun prosedur dalam permainan ini sebagai berikut: (a) Adanya peserta yang akan ikut bermain, (b) Setiap pemain disertai tempurung kelapa yang dihubungkan tali sebagai penyambung kaki mereka, (c) Membuat garis batas tempat dimulainya bermain dan garis *finish* tempat berakhirnya perlombaan, (d) Bila pemain terdiri dari 10 orang anak, maka tahap bermain dibagi ke dalam beberapa kelompok (misalnya menjadi 2 buah kelompok), (e) Melakukan pengundian pemain/ kelompok yang terlebih dahulu mengikuti perlombaan.¹¹ Tahap-tahap permainan diantaranya yaitu: (a) Perkelompok diperlombakan dalam seri, dari garis *start* hingga garis *finish* dipimpin oleh juri star dan waktu yang digunakan bermain dicatat oleh petugas pencatat waktu, (b) Sebelum perlombaan dimulai, para pemain berdiri di belakang garis *start* dengan memegang egrang, (c) Aba-aba perlombaan oleh wasit/ juri *start* adalah: „bersedia, siap, ya“. Pada aba-aba bersedia, tangan memegang egrang tempurung kelapa (kanan dan kiri), aba-aba siap dua kaki (kanan atau kiri) di atas tempat berpijak dan setelah aba-aba „ya“ lari, (d) Para pemain dinyatakan gugur bila menginjak garis lintas lebih dari dua kali dan kaki jatuh menyentuh tanah/ lantai lebih dari dua kali, dan dengan sengaja mengganggu atlet lain.

¹⁰ Laely, K., & Yudi, D., Pengaruh permainan egrang tempurung kelapa terhadap peningkatan kecerdasan kinestetik anak, *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 2015, 4(1), 32-41.

¹¹ Ibid h.36

Permainan tradisional lainnya adalah permainan congklak. Permainan ini dapat ditemukan diberbagai wilayah di Indonesia. Di setiap wilayah permainan Congklak dikenal dengan nama yang berbeda-beda, antara lain *teklek, engklek, ingkling, sundamanda atau sunda-manda, jlong-jling, lempeng, ciplak gunung, demprak, dampu*, dan masih banyak lagi, tetapi bentuk permainan sama.¹² Permainan tradisional Congklak adalah salah satu jenis permainan kreatif yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan merupakan hasil dari penggalian budaya lokal yang dapat dimainkan minimal dua orang dengan mempergunakan alat sederhana sesuai dengan potensi yang ada.

Congklak sangat mudah dimainkan. Permainan ini dapat dimainkan di pelataran tanah, semen atau aspal. Sebelum memulai permainan, terlebih dahulu harus digambar bidang atau area yang akan digunakan untuk bermain menggunakan kapur atau bahan dari kayu.

Jumlah pemain dalam permainan ini maksimal dua orang. Setiap pemain harus memiliki kreweng atau gacuk (katuk), yaitu pecahan batu atau bata, Peserta yang menang mendapat giliran main terlebih dahulu. Papan permainan congklak umumnya terbuat dari kayu dengan beberapa lubang, namun setiap wilayah indonesia memiliki perbedaan dalam jumlah lubang di setiap sisinya, semua papan memiliki dua lubang 'gudang' satu di setiap ujungnya. Desainnya bervariasi dari yang sederhana, kayu tanpa hiasan papan berbentuk perahu, hingga papan permainan yang dihias dengan berbagai ukiran yang indah. Nantinya dua orang pemain secara bergiliran memilih satu lubang kecil milik untuk memindahkan biji-biji satu persatu ke lubang lainnya sesuai jarum jam.

Permainan tradisional congklak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan permainan congklak antara lain: 1) biaya yang dibutuhkan sedikit./murah meriah. 2) membudayakan kegiatan numerasi. 3) dapat meningkatkan daya kreativitas siswa, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 4) membina jiwa sportif antar siswa dalam pembelajaran kelompok. Sedangkan kekurangan permainan congklak yaitu permainan ini hanya bisa dimainkan oleh dua orang saja dan media yang digunakan kurang menarik.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) berbasis permainan tradisional dalam meningkatkan kreativitas anak di kelompok B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022?

Berdasarkan latar belakang serta kajian teori di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Mengembangkan alat permainan edukatif (APE) berbasis permainan tradisional di kelompok B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Tahun Ajaran 2021/2022.

¹² Keen Achroni, *Permainan Dengklek*. (Diakses pada <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/viewFile/608/pdf>, Oktober 2021) hal. 16

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model Borg and Gal. penelitian pengembangan yaitu proses atau tahap dalam pengembangan suatu produk yang masih baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada sebelumnya.⁵³ Penelitian pengembangan merupakan sebuah riset yang bertujuan mengembangkan sebuah produk melalui serangkaian percobaan serta modifikasi untuk memperoleh hasil atau produk yang layak.¹³

Pengembangan model Borg and Gal berisi pedoman sistematis mengenai prosedur yang peneliti harus lakukan supaya hasil produk yang dirancang memiliki standar kelayakan. Borg & Gall (1983) mengemukakan bahwa proses penelitian dan pengembangan umumnya memiliki dua buah tujuan, yaitu: 1) pengembangan produk, dan 2) pengujian efektivitas produk untuk mendapatkan tujuan yang ditetapkan. Tujuan pertama disebut fungsionalitas pengembang, dan tujuan kedua disebut verifikasi. Oleh karena itu, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai pekerjaan pengembangan yang menyertai pekerjaan verifikasi. Borg dan Gall (1983:775) mengusulkan sepuluh rangkaian langkah yang harus dilakukan dalam pendekatan ini, yaitu “Penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, uji lapangan pendahuluan, revisi produk utama, uji lapangan utama, revisi produk operasional, uji lapangan operasional, revisi produk akhir, serta diseminasi dan implementasi

Model penelitian pengembangan versi Borg and Gall (1989) ini meliputi sepuluh kegiatan, yaitu:

- a. Studi Pendahuluan (Penelitian dan pengumpulan data). Pengukuran kebutuhan, studi literature, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai.
- b. Perencanaan penelitian. Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas.
- c. Pengembangan produk awal. Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrument evaluasi.
- d. Uji coba lapangan awal (terbatas).
- e. Revisi hasil uji lapangan terbatas.
- f. Uji lapangan lebih luas.
- g. Revisi hasil uji lapangan.
- h. Uji kelayakan.

⁵³ Nanasodih Sukmadinata, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013

¹³ Punanji Setyosari, *Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Malang, Kencana Prenada Media Group, 2015

- i. Revisi hasil uji kelayakan.
- j. Diseminasi dan sosialisasi produk akhir.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti, dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang peneliti observasi di lapangan adalah bagaimana pengembangan media berbasis muatan lokal serta antusias anak dalam mengikuti kegiatan bermain congklak yang dilakukan oleh anak Paud Nurul Yakin.

Interview dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis kepada tujuan penyelidikan. Karena interview banyak ragamnya maka di sini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, agar dapat diharapkan dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan dan keyakinan para responden, sedangkan sifat terpimpin diharapkan jalannya interview senantiasa terkontrol sesuai rencana yang diterapkan. Dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari lapangan dalam hal ini kami mewawancarai *stakeholders* yang ada dan bisa memberikan kami informasi atau data yang kami butuhkan. Dan sedangkan dokumentasi, dokumen yang penulis maksud dalam penulisan penelitian ini adalah dokumen mengenai hasil belajar dan foto saat proses tindakan berlangsung.

Pada penelitian pengembangan ini, instrument yang digunakan untuk mengukur kevalidan produk yang dikembangkan berupa angket yang diberikan kepada dua orang ahli yaitu 1) Validasi Ahli Desain yang menegavaluasi unsur kemenarikan tampilan dari produk media alat peraga, 2) Validasi Ahli Materi akan mengevaluasi tentang materi yang disajikan dalam media alat peraga. Angket validasi ahli desain terdiri atas indikator-indikator yaitu: a) ukuran APE, b) karakteristik APE c) petunjuk Kerja, d) kemudahan dan kesederhanaan desain, e) multifungsi, f) kemenarikan, g) ukuran, h) keawetan, i) kebutuhan, j) keamanan, k) kebersamaan, dan l) kreativitas. Sedangkan Angket Validasi Ahli Materi (Petunjuk APE) terdiri atas indikator-indikator meliputi: a) langkah-langkah petunjuk kerja APE disusun secara sistematis, b) prosedur penggunaan APE sangat jelas, c) Menggunakan bahasa mudah dipahami, d) kata kerja pada petunjuk penggunaan APE adalah kata kerja operasional, dan e) tulisan menggunakan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

Untuk teknik analisis data, analisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis kelayakan produk. Untuk menilai kelayakan produk dilakukan penilaian secara kualitatif dengan memberikan *checklist* pada angket validasi yang diberikan kepada validator. Hasil penilaian validator menggunakan skala konversi

HASIL

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini berupa alat permainan edukatif (APE) berbasis permainan tradisional dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini.

A. Pengembangan Produk

Produk yang dikembangkan berupa alat permainan edukatif (APE) berbasis permainan tradisional yaitu congklak dan egrang. Pemilihan congklak dan egrang berdasarkan hasil observasi bahwa APE tersebut belum ada di lokasi penelitian bahkan APE tersebut belum dikenal oleh peserta didik. Selanjutnya, congklak dan egrang merupakan APE yang sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya serta sesuai dengan usia subjek penelitian. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sangat dekat dengan lingkungan peserta didik mengingat lokasi sekitar penelitian dekat dengan toko bangunan, profesi sebagian warga di sana identik dengan pertukangan. Dengan demikian kondisi semacam ini sangat mendukung untuk mengembangkan APE berbasis tradisional.

B. Kelayakan APE Berbasis Permainan Tradisional

1. Potensi dan Masalah

Pada penelitian ini potensi dan masalah yang didapatkan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara kepada guru di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela bahwa alat permainan edukatif masih sangat jarang digunakan disebabkan alat permainan edukatif yang ada di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela masih sangat kurang karena terbatas pada alat permainan edukatif hanya *indoor* yang berbasis plastik. Untuk alat permainan edukatif *outdoor* hanya terbatas pada ayunan yang berbahan besi saja. Dari potensi dan masalah yang ada peneliti ingin mengembangkan alat permainan edukatif (APE) berbasis tradisional untuk mengembangkan kreativitas anak disamping itu untuk merangsang kreativitas pendidik mengembangkan APE yang lain yang berbasis tradisional.

2. Mengumpulkan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan observasi, tentang alat permainan edukatif (APE) berbasis tradisional sebagai media pembelajar bagi anak usia dini.

3. Desain Produk

Desain produk dilakukan setelah analisis kebutuhan di PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut maka ditetapkan dua buah produk yang dikembangkan yaitu congklak dan egrang. Bahan-bahan untuk APE congklak dan egrang sangat mudah ditemukan sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan produk tersebut. Pengembangan produk congklak dan egrang didesain berdasarkan faktor usia dan fisik kelas B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela dan ide-ide dari para pendidik PAUD Nurul Yaqin

Kedondong Daya Desa Pringgasela. Untuk tampilan produk, dikembangkan berdasarkan arahan peneliti dan masukan dari tukang setempat yang mendukung pengembangan APE congklak dan egrang sehingga memiliki desain yang elegan dan tahan lama sehingga dapat dijadikan sebagai inventaris bagi PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela.

4. Validasi Desain

Setelah pembuatan produk awal alat permainan edukatif congklak dan egrang dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini, kemudian produk divalidasi oleh beberapa ahli yaitu : ahli materi, dan ahli media. Adapun validasi produk oleh ahli sebagai berikut:

1) Validasi Oleh Ahli Desain

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi, untuk materi divalidasi dilakukan oleh satu ahli materi berkaitan dengan kesesuaian desain produk yang dikembangkan, hasil validasi oleh ahli desain produk awal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Hasil Angket Validasi Ahli Desain Egrang

Indikator	Hasil Skor Angket Validasi Egrang	Kategori
Ukuran APE	4	Layak
Karakteristik APE	4	Layak
Petunjuk Kerja	4	Layak
Kemudahan dan Keunikan Desain	4	Layak
Multifungsi	4	Layak
Kemenarikan	4	Layak
Ukuran	3,5	Layak
Keawetan	4	Layak
Kebutuhan	4	Layak
Keamanan	4	Layak
Kebersamaan	4	Layak
Kreativitas	4	Layak
Jumlah	47,5	
Rata-rata	3,96	Layak

Berdasarkan tabel 4.1 penilaian oleh validasi ahli desain egrang di atas diketahui kelayakan desain mendapatkan rata-rata 3,96. jika dilihat dari tabel konversi

kelayakan, maka kelayakan desain untuk egrang berada pada interval 3, $35 \leq X < 4,05$ dengan kategori layak, artinya APE egrang layak untuk diujicobakan.

Tabel 2.
Angket Validasi Ahli Desain Congklak

Indikator	Hasil Skor	
	Angket Validasi Congklak	Kategori
Ukuran APE	4	Layak
Karakteristik APE	4	Layak
Petunjuk Kerja	4	Layak
Kemudahan dan Keunikan Desain	4	Layak
Multifungsi	4	Layak
Kemenarikan	4	Layak
Ukuran	3	Cukup Layak
Keawetan	5	Sangat Layak
Kebutuhan	4	Layak
Keamanan	4	Layak
Kebersamaan	4	Layak
Kreativitas	5	Sangat Layak
Jumlah	49	
Rata-rata	4,08	Layak

Berdasarkan tabel 4.2 penilaian oleh validasi ahli desain congklak di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan desain mendapatkan rata-rata 4,08. jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka kelayakan desain untuk egrang berada pada interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE egrang layak untuk diujicobakan.

2) Validasi Oleh Ahli Materi

Produk yang telah dikembangkan kemudian dinilai oleh satu ahli media berkaitan dengan desain produk, hasil validasi oleh ahli media pada produk awal disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 3.
Hasil Validasi Angket Ahli Materi (Petunjuk penggunaan) Egrang

Indikator	Hasil Skor Angket Validasi Egrang	Kategori
Langkah-langkah petunjuk kerja APE disusun secara sistematis	4	Layak
Prosedur penggunaan APE sangat jelas	4	Layak
Menggunakan bahasa mudah dipahami	4	Layak
Kata kerja pada petunjuk penggunaan APE adalah kata kerja operasional	4	Layak
Tulisan menggunakan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)	5	Sangat Layak
Jumlah	21	
Rata-rata	4,2	Sangat Layak

Berdasarkan tabel 4.3 penilaian oleh validasi ahli materi egrang di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan mendapatkan rata-rata skor kelayakan 4,2. jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka kelayakan desain untuk egrang berada pada interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE egrang sangat layak untuk diujicobakan.

Tabel 4.

Hasil Validasi Angket Ahli Materi Congklak

Indikator	Hasil Skor Angket Validasi Egrang	Kategori
Langkah-langkah petunjuk kerja APE disusun secara sistematis	4	Layak
Prosedur penggunaan APE sangat jelas	3	Cukup Layak
Menggunakan bahasa mudah dipahami	4	Layak
Kata kerja pada petunjuk penggunaan APE adalah kata kerja operasional	5	Sangat Layak
Tulisan menggunakan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)	5	Sangat Layak
Jumlah	21	
Rata-rata	4,2	Sangat Layak

Berdasarkan tabel 4.4 penilaian oleh validasi ahli materi congklak di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan desain mendapatkan rata-

rata skor kelayakan 4,2. Jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka kelayakan materi untuk egrang berada pada interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE congklak layak untuk diujicobakan.

5. Revisi Desain

Setelah dilakukan penilaian produk yang dilakukan oleh validator ahli media, dan ahli materi maka didapat saran dari para validator kemudian saran yang diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk hasil revisi dapat dijelaskan sebagai berikut: Saran terhadap alat permainan edukatif bahwasanya produk layak digunakan dengan catatan:

- a) Saran untuk APE egrang sebaiknya alat/bahan yang digunakan adalah pipa dengan ketebalan inci. Sedangkan untuk congklak bahan-bahannya terdiri dari bambu dan papan pipa tanpa menggunakan gelas plastik yang cenderung tipis.
- b) Pengecatan egrang dan congklak menggunakan kombinasi warna sehingga tampak lebih menarik.

Sedangkan hasil revisi dari ahli media berupa perbaikan dan saran terhadap alat permainan edukatif, menurut validator penggunaan APE disesuaikan dengan materi yang digunakan.

6. Uji coba produk

Tahapan uji coba dilakukan peneliti adalah uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan dengan melibatkan guru dan kepala PAUD.

Tabel 5.

Hasil Angket Validasi Desain Uji Coba Egrang

Indikator	Hasil Skor Angket Validasi	
	Egrang	
	Validasi Guru (Uji Coba Skala Kecil)	Validasi Guru (Uji Coba Skala Besar)
Ukuran APE	5	5
Karakteristik APE	4	5
Petunjuk Kerja	4	4
Kemudahan dan Keunikan Desain	4	4
Multifungsi	4	5
Kemenarikan	4	4
Ukuran	4	4
Keawetan	5	5
Kebutuhan	4	4
Keamanan	4	4

Kebersamaan	4	4
Kreativitas	5	5
Jumlah	51	53
Rata-rata	4,25	4,42

Tabel 6.
Hasil Angket Validasi Materi Uji Coba Egrang

Indikator	Hasil Skor Angket Validasi Egrang	
	Validasi Guru	Validasi Guru
	(Uji Coba Skala Kecil)	(Uji Coba Skala Besar)
Langkah-langkah petunjuk kerja APE disusun secara sistematis	4	4
Prosedur penggunaan APE sangat jelas	4	4
Menggunakan bahasa mudah dipahami	4	4
Kata kerja pada petunjuk penggunaan APE adalah kata kerja operasional	4	5
Tulisan menggunakan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)	5	5
Jumlah	21	22
Rata-rata	4,2	4,4

1) Uji Coba Sekala Kecil

Hasil validasi ahli desain APE berbasis permainan tradisional egrang dan congklak (Oleh Guru) berdasarkan tabel 4.5 penilaian oleh validasi ahli desain egrang pada uji coba skala kecil di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan desain mendapatkan rata-rata skor kelayakan 4,25. jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka kelayakan desain untuk egrang berada pada interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE egrang sangat layak untuk diujicobakan dalam skala besar. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.6 validasi materi/petunjuk egrang pada uji coba skala kecil di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan materi produk yang dihasilkan mendapatkan rata-rata skor kelayakan 4,2. Jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka kelayakan desain untuk congklak berada pada

interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE egrang sangat layak untuk diujicobakan dalam skala yang besar.

2) Uji Coba Skala Besar

Hasil validasi desain APE berbasis permainan tradisional egrang (oleh guru) pada uji coba skala kecil tabel 4.5 di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan desain mendapatkan rata-rata skor kelayakan 4,42. Jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka kelayakan desain untuk egrang berada pada interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE egrang sangat layak untuk disosialisasikan sehingga produk yang dihasilkan dapat diterapkan dalam skala yang besar.

Demikian juga untuk validasi materi/petunjuk penggunaan egrang, berdasarkan tabel 4.6 hasil uji coba skala besar di atas diketahui pada seluruh aspek tentang aspek kelayakan mendapatkan rata-rata skor kelayakan 4,4. Jika dilihat dari tabel konversi kelayakan, maka skor kelayakan oleh ahli materi egrang berada pada interval $X \geq 4,05$ dengan kategori sangat layak, artinya bahwa APE egrang sangat layak untuk disosialisasikan dan diterapkan dalam skala yang besar.

7. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas

Untuk revisi hasil uji lapangan terbatas terdapat saran agar:

1. Egrang disesuaikan dengan rata-rata kondisi fisik anak PAUD
2. Kekuatan egrang dua kaki dan satu kaki seimbang sehingga kualitas egrang lebih baik
3. Congklak dengan buah kancing sebaiknya disesuaikan dengan besar lubang congklak sehingga mampu menampung biji buah kancing baju
4. Pewarnaan congklak lebih kontras dari pewarnaan sebelumnya sehingga congklak terlihat lebih menarik

8. Uji Produk Skala Besar

Tahapan uji coba dilakukan peneliti adalah uji coba kelompok lebih luas yaitu peserta didik kelas B PAUD Nurul Yaqin Kedondong, peneliti juga melibatkan guru PAUD Nurul Yaqin Kedondong untuk menilai produk dari aspek kelayakan.

9. Revisi Hasil Uji Lapangan

Untuk revisi hasil uji lapangan terbatas terdapat saran agar egrang bongkar pasang satu dan dua kaki sebaiknya diberikan kepala pada pijakan sehingga peserta didik lebih seimbang berdiri ketika berada di atas egrang. Untuk congklak, diameter lubang congklak ditambah 1 cm sehingga terdapat kesesuaian antara papan congklak dengan dengan besar lubang congklak

10. Uji Kelayakan

Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh ahli desain dan materi didapatkan data bahwa APE egrang dan congklak layak diujicobakan. Dalam uji coba, kelayakan produk divalidasi oleh salah seorang guru yang kompeten dalam bidang desain dan materi APE.

11. Revisi Hasil Uji Kelayakan

Revisi hasil kelayakan dalam skala besar hanya pada penguatan rekatan lubang congklak pada papan congklak sehingga tidak mudah rusak dan digunakan dalam jangka waktu yang lama.

12. Diseminasi dan Sosialisasi Produk Akhir

Pada tahap ini terdapat kegiatan sosialisasi agar pemanfaatan APE egrang dan congklak dalam pembelajaran di PAUD Nurul Yaqin Kedondong digalakkan baik dengan sosialisasi dengan wali murid, dan atau memperbanyak APE egrang dan congklak dengan swadaya lembaga.

PEMBAHASAN

Produk berupa Alat Permainan Edukatif (APE) Berbasis Permainan Tradisional telah selesai dikembangkan melalui beberapa tahapan, mulai dari a) Studi Pendahuluan (Penelitian dan pengumpulan data). Pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. b) Perencanaan penelitian. Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. c) Pengembangan produk awal. Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrument evaluasi. d) Uji coba lapangan awal (terbatas). e) Revisi hasil uji lapangan terbatas. f) Uji lapangan lebih luas. g) Revisi hasil uji lapangan. h) Uji kelayakan. i) Revisi hasil uji kelayakan. dan e) Diseminasi dan sosialisasi produk akhir.

Pada tahap studi pendahuluan (penelitian dan pengumpulan data, dilakukan analisis kebutuhan berupa analisis kurikulum, media dan sumber belajar serta analisis karakteristik peserta didik. pada tahap ini ditemukan permasalahan bahwa terdapat kurangnya pemanfaatan media dalam alat permainan edukatif yang ada, sehingga memerlukan pengembangan APE berbasis tradisional berupa egrang dan congklak.

Berdasarkan temuan analisis kebutuhan, maka dilanjutkan dengan perencanaan penelitian, dengan perencanaan ini peneliti mempertimbangkan kondisi dan situasi serta waktu dalam penelitian agar penelitian ini lebih efektif dan efisien.

Pada tahap Pengembangan produk awal terdapat beberapa langkah yaitu pengembangan produk berupa APE berbasis tradisional. Produk yang sudah dikembangkan

kemudian di validasi oleh 2 (dua) orang ahli yaitu ahli desain dan ahli materi. Setelah produk divalidasi oleh para ahli dan diberi saran atau komentar, selanjutnya produk direvisi. Revisi dilakukan untuk penyempurnaan produk yang dihasilkan sesuai dengan masukan dari para ahli. Setelah produk selesai direvisi dilakukan uji coba lapangan awal (terbatas)/skala kecil terhadap 7 (tujuh) peserta didik. Uji coba dilakukan untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran yang sudah dikembangkan kemudian dilakukan revisi hasil uji lapangan terbatas.

Tahap uji lapangan lebih luas dan revisi hasil uji lapangan dilakukan melalui uji coba skala besar terhadap 17 (tujuh belas) peserta didik. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pembelajaran berbantuan APE yang telah dikembangkan. Pada akhir pembelajaran guru diminta untuk memberikan penilaian terhadap media yang dikembangkan pada angket yang telah disiapkan.

Tahap selanjutnya pada penelitian ini yaitu uji kelayakan, revisi hasil uji kelayakan. dan diseminasi dan sosialisasi produk akhir. Uji kelayakan dilakukan dengan menganalisis hasil penilaian guru terhadap APE yang dikembangkan. Selanjutnya dilakukan revisi dan sosialisasi produk yang dikembangkan di PAUD Nurul Yaqin.

Hasil kelayakan APE berbasis tradisional menunjukkan bahwa, media pembelajaran secara keseluruhan sangat layak dan dapat dikatakan sudah valid digunakan sebagai media pembelajaran. Kelayakan dan kevalidan tersebut dibuktikan dari hasil validasi oleh ahli desain, ahli materi, uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Validasi Ahli Desain

Kelayakan materi pada desain APE berbasis tradisional dibagi menjadi 12 indikator. Berdasarkan hasil validasi 2 orang ahli desain didapat skor rata-rata keseluruhan untuk egrang 3,9. Sedangkan untuk congklak rata-rata skor mencapai 4,08. Apabila dikonversikan dalam bentuk skala kelayakan maka kedua rata-rata skor ahli desain sama-sama berada pada kategori layak dan sangat layak. Hal ini dapat diartikan bahwa APE egrang dan congklak yang dikembangkan sangat layak dan sudah valid digunakan dalam pembelajaran.

b. Validasi Ahli Materi

Kelayakan materi pada desain APE berbasis tradisional dibagi menjadi 5 indikator. Berdasarkan hasil validasi 2 orang ahli desain didapat skor rata-rata keseluruhan untuk egrang 4,2. Sedangkan untuk congklak rata-rata skor mencapai 4,6. Apabila dikonversikan dalam bentuk skala kelayakan maka kedua rata-rata skor ahli desain masing-masing berada pada kategori sangat layak. Hal ini dapat diartikan bahwa APE egrang dan congklak yang dikembangkan sangat layak dan sudah valid digunakan dalam pembelajaran..

c. Uji Coba Skala Kecil

Uji coba skala kecil dilakukan untuk mengetahui kepraktisan APE pada aspek desain dan materi. Berdasarkan penghitungan secara keseluruhan pada uji coba skala kecil terhadap 7 orang peserta didik, untuk egrang diperoleh rata-rata skor 4,25 dan 4,2. Sedangkan untuk congklak diperoleh skor rata-rata 4,2 dan 4,3. Bila nilai tersebut dikonversikan ke dalam bentuk skala kelayakan maka kedua rata-rata skor validasi desain sama-sama berada pada kategori sangat layak. Hal ini dapat diartikan bahwa APE egrang dan congklak yang dikembangkan sangat layak dan sudah valid diujicobakan dalam skala besar.

d. Uji Coba Skala Besar

Uji coba skala besar dilakukan untuk mengetahui respon peserta didik pada aspek kualitas isi dan tujuan, kualitas teknik, dan kualitas pembelajaran. Berdasarkan penghitungan secara keseluruhan pada uji coba skala besar terhadap 17 orang peserta didik, diperoleh validitas desain egrang dan congklak rata-rata skor 4,42 dan 4,4. Sedangkan untuk validitas ahli materi mencapai rata-rata 4,4 dan 4,6. Artinya masing-masing validator memberikan nilai kelayakan pada produk yang dikembangkan dengan kategori yang sangat layak untuk disosialisasikan dan digunakan dalam pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan APE berbasis permainan tradisional, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) berbasis permainan tradisional dalam meningkatkan kreativitas anak di kelompok B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022 dinyatakan layak dan sudah valid untuk digunakan dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan hasil penilaian produk APE egrang dari 2 orang yaitu ahli desain dan ahli materi memperoleh skor rata-rata 3,96 dengan kategori layak diujicobakan dan 4,2 dengan kategori sangat layak diujicobakan. Sedangkan untuk uji kelompok kecil dan besar dari validasi salah satu guru memperoleh nilai berturut-turut 4,25, dan 4,42. Dengan demikian APE egrang memiliki validitas sangat layak. Sedangkan untuk penilaian produk congklak dari 2 orang yaitu ahli desain dan ahli materi memperoleh skor rata-rata keduanya 4,08 dan 4,2, dengan kategori sangat layak diujicobakan. Sedangkan untuk uji kelompok kecil dan besar dari validasi salah satu guru memperoleh nilai berturut-turut 4,2, dan 4,6. Dengan demikian APE congklak memiliki validitas sangat layak.

Pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) berbasis permainan tradisional dalam meningkatkan kreativitas anak di kelompok B PAUD Nurul Yaqin Kedondong Daya Desa Pringgasela Tahun Pembelajaran 2021/2022 dinyatakan sangat efektif dalam meningkatkan kreativitas anak. Hal ini berdasarkan hasil kreativitas anak dari uji coba permainan egrang dan congklak yaitu untuk permainan egrang, minggu pertama menghasilkan rata-rata keenam aspek kreativitas yaitu 5 aspek masuk pada kategori mulai

berkembang, sedangkan satu aspek yaitu aspek kreativitas 3 masuk pada kategori perlu intervensi. Pada minggu kedua menghasilkan rata-rata keenam aspek kreativitas yaitu 5 aspek masuk pada kategori berkembang, sedangkan satu aspek yaitu aspek kreativitas 3 masuk pada kategori mulai berkembang. Untuk permainan congklak, minggu pertama menghasilkan rata-rata kelima aspek kreativitas yaitu 4 aspek masuk pada kategori mulai berkembang, sedangkan satu aspek yaitu aspek kreativitas 3 masuk pada kategori berkembang. Pada minggu kedua menghasilkan rata-rata kelima aspek kreativitas yaitu 5 aspek masuk pada kategori berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarti, W. (2009). Alat Permainan Edukatif Berbahan Limbah dalam Pembelajaran Sains di Taman Kanak-Kanak. *Lembaran Ilmu Kependidikan* Jilid 38 No. 1 Tahun 2009
- Arif, I. M. (2016) Alat Permainan Edukatif Outdoor yang Digunakan Mengembangkan Motorik Kasar di TK Se-Kec.WonosariGunung Kidul. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Edisi 8 Tahun 2016.
- Febrina, F., Harsanto, P. W., & Basuki, R. M. N. (2019). Perancangan Kampanye Sosial Pentingnya Seni dalam Pendidikan Anak. *Jurnal DKV Adivarna*, 1(14), 9.
- Hasanah, U. (2019). Penggunaan Alat Permainan Edukatif (Ape) Pada Taman Kanak-Kanak Se-Kota Metro. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1), 20-40.
- Keen Achroni, *Permainan Dengklek*. (Diakses pada <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/608/pdf>, Juli 2017) hal. 16
- Laely, K., & Yudi, D. (2015). Pengaruh permainan egrang tempurung kelapa terhadap peningkatan kecerdasan kinestetik anak. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1), 32-41.
- Munandar, U. (2021). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Setyosari, P. (2015). *Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Malang: Kencana Prenada Media Group.
- Sukmadinata, N. (2013). *Penilaian Hasil Prosel Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Patmonodewo. (2003). *Pendidikan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soesanto. (2022). Pengertian dan Mascam-macam Permainan Tradisional Berbagai Daerah. Diakses pada <https://antoksoesanto.blogspot.com/2014/08/pengertian-dan-macam-permainan-tradisional.html>, Dikunjungi pada tanggal 2 Januari 2022.
- Sumanto. (2015). *Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak TK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Suyanto, S. (2005). *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hidayat publishing.

Keterlibatan Politik Tuan Guru dalam Pengelolaan Pondok Pesantren di Lombok Utara (Multi Kasus)

Muliani¹, Ismail², Muh. Saleh³

Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia

email: ¹iyemuly@gmail.com

ABSTRACT

Tuan Guru is an essential part of the Islamic boarding school and is a characteristic of the pesantren community. Tuan Guru's position is not only as a formal leader but also as an informal leader whose job is to empower the community. Tuan Guru also functions as a moral force that participates in providing normative awareness of the community. The purpose of this study was to find out the forms of teacher involvement in politics, the constraints and impacts on Islamic boarding schools in North Lombok Regency. The research method used is qualitative research. The research data is described or described in the form of a description according to the actual situation. There are two sources of data in this research, namely primary data obtained directly from informants and secondary data obtained from books relevant to the problem under study. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out logically and systematically with four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that the form of Tuan Guru's involvement in politics in Islamic boarding schools in North Lombok Regency is intended to spread and maintain Islamic teachings and values, exercise control in society, help solve social problems where Tuan Guru is a problem solver for problems that arise, faced by society, and become agents of social change. In addition, it is carried out in the form of practical politics and indirect politics. Constraints faced are delinquency of students (santri), indiscipline, motivation, unhealthy social environment, attention of parents of students and economic ability of parents of students. and the impact is the increasing social status, can be of wider benefit to the community, can grow new insights and experiences and become more alert or introspective where Tuan Guru being a politician means being a person who is always aware of where the political world is.

Keywords: Politic, Tuan Guru, Islamic Boarding School

ABSTRAK

Tuan Guru merupakan bagian hakiki dari pondok pesantren dan menjadi ciri khas masyarakat pesantren. Kedudukan Tuan Guru tidak hanya sebagai pemimpin formal tetapi juga sebagai pemimpin informal yang tugasnya memberdayakan masyarakat. Tuan Guru juga berfungsi sebagai moral force yang ikut serta memberikan kesadaran normatif terhadap masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik, kendala dan dampaknya di pondok pesantren Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Data hasil penelitian dideskripsikan atau dijabarkan dalam bentuk uraian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara logis dan sistematis dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah diarahkan untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam, melakukan kontrol dalam masyarakat, membantu memecahkan persoalan kemasyarakatan di mana tuan guru sebagai problem solver bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial. Selain itu dilakukan dalam bentuk politik praktis dan politik tidak langsung. Kendala yang dihadapi yaitu kenakalan santri (santri), ketidaksiplinan, motivasi, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, perhatian

orang tua santri dan kemampuan ekonomi orang tua santri. dan dampaknya adalah semakin meningkatnya status sosial, dapat bermanfaat secara lebih luas kepada masyarakat, dapat menumbuhkan wawasan dan pengalaman baru dan menjadi lebih waspada atau mawas diri di mana tuan guru menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada di mana dunia politik.

Kata Kunci: Politik, Tuan Guru, Pondok Pesantren

<i>Submitted:</i> 15 Maret 2022	<i>Revised:</i> 28 April 2022	<i>Accepted:</i> 17 Mei 2022
<i>Final Proof Received:</i> 29 Mei 2022	<i>Published:</i> 30 Juni 2022	

How to cite (in APA style):
Muliani, Ismail, & Saleh, M. (2022). Keterlibatan Politik Tuan Guru dalam Pengelolaan Pondok Pesantren di Lombok Utara (Multi Kasus). *Schemata*, 11 (1), 23-38

PENDAHULUAN

Tuan guru merupakan sebuah entitas yang memiliki pengaruh besar dalam arus sosial politik di Indonesia. Pengaruh itu terutama dibangun oleh para Tuan Guru dengan menyandarkan diri pada institusi yang berbasis pada pendidikan (Islam) yang bernama pesantren yang menempatkan diri ulama, Tuan Guru patron dengan modal pengetahuan agamanya. Terlebih pesantren- pesantren tersebut kebanyakan dibangun di kampung-kampung, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara Tuan Guru, pesantren, dengan masyarakat sekitar. Modal pengetahuan dan posisi Tuan Guru sebagai entitas tertinggi di institusi pesantren tersebut, menempatkan para Tuan Guru sebagai sosok dengan ketokohan yang sentral, terutama di masyarakat berbasis Islam tradisional.¹

Tuan Guru merupakan sosok orang tua, guru serta ulama yang patut dihormati dan cukup disegani karena mereka memberikannasihat, ilmu dan pembelajaran. Dalam kehidupan, Tuan Guru mempunyai peranan cukup penting karena merupakan tokoh yang dijadikan sebagai panutan. Hegemoni Tuan Guru yang sangat besar terhadap santri dan masyarakat sekitar kadang mampu memberikan implikasi non logis bagi masyarakat. Segala perkataan Tuan Guru selalu dianggap benar; segala hal yang diperintahkan Tuan Guru dianggap bertujuan untuk kebaikan dunia akhirat, dan semua yang dilakukan Tuan Guru jauh dari unsur kesalahan.

Tuan Guru merupakan bagian hakiki dari pondok pesantren. Seringkali ia merupakan seorang pendiri pesantren itu sendiri. Sudah sepatutnya pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung pada kemampuan pribadinya. Ketokohan Tuan Guru merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren, ini terjadi karena budaya masyarakat Indonesia yang paternalistik tetapi pribadi Tuan Guru sendiri yakni gelar yang tercipta melalui proses teologis. Kedudukan Tuan Guru tidak hanya sebagai pemimpin formal pondok pesantren semata melainkan sebagai pemimpin informal (informal leaders)

¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2003), 23.

yang tugasnya memberdayakan masyarakat. Tuan Guru juga berfungsi sebagai moral force yang ikut serta memberikan kesadaran normatif terhadap masyarakatnya.²

Hubungan antara Tuan Guru dan para umatnya cukup dekat, dan peranan Tuan Guru cukup besar dalam kehidupan umatnya. Segala yang disampaikan oleh Tuan Guru niscaya akan ditiru oleh umatnya. Dalam masyarakat Lombok Utara, Tuan Guru paling dihormati dibandingkan golongan sosial yang lain. Tuan Guru memiliki penghormatan sosial dari masyarakatnya. Tuan Guru akan lebih dihormati kalau ia memiliki kharisma, karena kelebihan ilmu agamanya itu. Pesantren yang awalnya erat kaitannya dengan segala bentuk pengajaran norma, mulai terkikis dan berubah sebagai ajang kampanye. Hampir mayoritas Tuan Guru di pesantren menjadi bagian dalam partai politik dan mengusung mereka sebagai kandidat kuat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena ini sempat memberikan perbedaan persepsi adanya pro dan kontra dalam masyarakat.

Dunia tuan guru merupakan dunia yang dipenuhi dengan nilai-nilai moral, kebaikan dan kebajikan. Sedangkan politik penuh dengan intrik, lumpur, dan noda. Individu yang memegang kekuasaan akan membuatnya terlena dan menjadi lupa daratan. Legitimasi Tuan Guru bukanlah diperoleh melalui jalan kekuasaan, tetapi sikap dan tindakan moralnya, disamping memiliki otoritas keagamaan. Jadi, ketika turut serta ke dunia politik bukan meneguhkan pamor dan karisma seorang Tuan Guru, tetapi sebaliknya. Tuan Guru akan dihegemoni oleh para politisi lain yang terjun di bidang tersebut.

Pandangan kedua berada di posisi sebaliknya yang berpendapat bahwa justru karena dunia politik praktis yang selama ini dianggap noda dan kotor sehingga perlu dibenahi dan diluruskan.³ Sosok Tuan Guru yang bersih, berilmu dan bermoral berkewajiban untuk membenahinya yakni dengan ikut serta didalamnya. Bukan sekedar memantau di luar pagar dan memberikan nasihat, tetapi patut memberikan panutan secara langsung cara menjadi politisi yang menjunjung nilai moral dan kebaikan. Kewajiban ini tidak bisa dilepaskan dari status Tuan Guru sebagai pewaris nabi yang menjadi sosok panutan.⁴

Fenomena sosial politik Tuan Guru yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia pasca kolonialisasi, dan khususnya pada era reformasi, menggerakkan mereka untuk memperbaiki sisi politik aktivitas umat muslim. Politik berbasis moral ditawarkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepada praktik politik menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Latar fenomena sosial politik sekarang ini sangat tepat dalam menawarkan konsep dan praktik politik yang sarat dengan nilai-nilai ethic politic (Etika politik).

² Agus Dedi Putrawan, *Runtuhnya Karisma Tuan Guru* (Mataram, 2017), 9–10.

³ Muhammad Amin, *Mengislamkan kursi dan meja: dialektika ulama dan kekuasaan* (Pustaka Pelajar, 2009), 86–97

⁴ Putrawan, *Runtuhnya Karisma Tuan Guru*, 10–11

Belakangan ini pejabat-pejabat Negara termasuk elit politik tanah air sering mengunjungi Pondok pesantren, dengan maksud silaturahmi serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah, melalui berbagai konsep dan strategi dilapangan dengan harapan dapat mencuri perhatian Tuan Guru, santri dan masyarakat sekitar sehingga menjadi agenda cukup penting para elite politik untuk dapat melakukan blusukan ke pesantren-pesantren supaya memperoleh restu dan dukungan dari para Tuan Guru, pembina, alumni, simpatisan, dan santri karena dipercaya bahwa salah satu lembaga pendidikan yang mampu menjadi penopang dalam bursa pencalonan politik di Indonesia adalah pesantren.

Pondok pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan dalam segi keagamaan (tafaqquh fi addien) serta menjadi lembaga layanan sosial di masyarakat (dakwah), merujuk pada Al-Qur'an surah At-Taubah 122. Pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan terkait ilmu agama dan nilai-nilai kesantunan kurangdiperhatikan oleh para politisi atau pemangku jabatan. Sedangkan peran dalam lembaga dakwah yang berkaitan dengan masyarakat, begitu menarik perhatian para politisi dalam mendongkrak hak suara politiknya karena kedudukan Tuan Guru sebagai pendiri serta pengeloladi pondok pesantren mempunyai karisma yang sangat besar di mata santri, alumni, maupun masyarakat sekitarnya. Hermawan Sulisty, seorang Tuan Guru memiliki monopoli interpretasi dan monopoli suara kolektif terhadap dunia luar. Berkenaan dengan basis keagamaan, masyarakat dan para santri akan mendengar titah dan patuh (saman wa thaatan) pada Tuan Guru. Hal ini membuat para politisi pun tidak dapat menganggap remeh dengan pesantren besar yang sudah dibangun puluhan tahun, dan cukup banyak mencetak ribuan, bahkan berjuta santri yang telah menjadi tokoh penting di kalangan masyarakat dan mempunyai lembaga pendidikan sendiri.⁵

Di lain pihak, para Tuan Guru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin dan pengelola pondok pesantren terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, Tuan Guru yang menitikberatkan pada pendekatan sosio kultural. Tuan Guru seperti ini cenderung tertutup dan tidak bersedia dikunjungi elit politik dan pejabat pemerintahan. Tradisi dibangun pada Tuan Guru ini untuk menutup diri dari kancan politik yang mempengaruhi kredibilitasnya, terutama politik praktis. Kelompok kedua adalah Tuan guru yang membuka diri pada politik dan ada pula yang ikut serta terlibat langsung dengan politik praktis. Kelompok ini membuka secara lebar pintu untuk para elit politik dan pejabat pemerintahan.⁶ Jadi tidak heran ada beberapa Tuan Guru ikut terjun dalam dunia politik dengan alasan

⁵ Hermawan Sulisty dan Ahmad Suaedy, "Kyai & demokrasi: sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu, dan partai politik (Diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2000), 25

⁶ Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia," MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan 19, no. 2 (8 Juni 2003): 200–201, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i2.103>

strategi pragmatis. Tuan Guru memiliki basis massa yang jelas serta kuat, ketika kekuatan tersebut tidak digunakan, maka akan terbuang sia-sia. Oleh sebab itu, dalam definisi yang cukup pragmatis kadang muncul tawar menawar politik dan membangun kontrak politik. Tuan Guru sebagai pengelola pondok pesantren dan pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya jika Tuan Guru tidak sekedar mendengarkan keluhan kesah rakyat, tetapi Tuan Guru berhak menyampaikan segala aspirasi umat. Sudah sepatutnya Tuan Guru sebagai pengasuh pondok pesantren menjadi jembatan khusus antara kepentingan rakyat dan para pejabat negara.

Perdebatan seperti itu memang tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praktis untuk mendukung pendapat mereka. Di dalam penelitian ini, kedua pendapat tersebut akan diletakkan sebagai dasar pijak untuk menjawab permasalahan mengapa banyak Tuan Guru yang terlibat dalam politik, apakah motivasi yang melatar belakangi, bagaimana dampak keterlibatan Tuan Guru dalam politik sebagai pengelola pondok pesantren sebagaimana yang terjadi di Lombok Utara dalam ranah politik praktis bukan saja berdampak pada eksistensi politik pesantren dan komunitasnya, namun juga berakibat luas bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pesantren sebagai sumber rujukan keagamaan dan referensi politik.

Berhubungan dengan paparan di atas kami menemukan bahwa ada beberapa pondok pesantren di Lombok Utara yang Tuan Gurunya terlibat dalam politik praktis seperti di pondok pesantren Darul Iman Bentek yang dipimpin oleh TGH. Najmul Akhyar dan pondok pesantren Assyafi'iyah dipimpin oleh TGH. Jamhur Hakim di Lombok Utara. Dalam pengamatan kami keterlibatan kedua tokoh tersebut di atas membawa dampak positif dan negatif terhadap pengelolaan pesantren, sehingga kami ingin meneliti lebih jauh bagaimana keterlibatan mereka dan apa dampak dari keterlibatan mereka dalam berpolitik dimana mereka berposisi sebagai pondok pesantren.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan tanpa menggunakan rumus-rumus dan symbol- simbol statistik. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Jadi penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada persoalan kualitas data bukan banyaknya data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Menurut Issac sebagaimana yang dikenalkan Umar, tujuan adanya pendekatan penelitian untuk menggambarkan secara sistematis ciri dari populasi tertentu secara faktual dan cermat. Dengan kata lain, pendekatan deskriptif merupakan jenis pendekatan penelitian yang melihat pada obyek atau kondisi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta yang akan diselidiki dan hasilnya bisa dipakaidalam mengambil keputusan pada penelitian mendatang. Lokasi atau

tempat penelitian ini yaitu di pondok pesantren yang ada di Lombok Utara diantaranya Pondok Pesantren Darul Iman Bentek, dan Pondok Pesantren Assyafiyyah Menggala.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong berpendapat bahwa data primer atau utama yang dipakai ialah kata-kata dan tindakan dari individu yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil interview dan observasi. Sedangkan data sekunder atau pendukungnya dari sumber kepustakaan dan referensi-referensi lain seperti artikel, jurnal atau dokumentasi lain yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti dan dapat menunjang sepenuhnya penelitian ini.

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama (Key Instrument). Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian meliputi: wawancara, observasi serta penggalan dokumen (catatan atau arsip). Adapun analisis data pada penelitian ini mengikuti model Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu Data Collection, Reduksi Data, Display Data and Conclusions (kesimpulan) dan verifying.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Tuan Guru dalam Politik di Pondok Pesantren

Bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dari dua sisi yaitu melakukan politik praktis atau terlibat secara langsung dan terlibat secara tidak langsung. Dalam politik praktik tuan guru terjun secara langsung mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah. Sedangkan secara tidak langsung tuan guru hanya terlibat sebagai pendukung dan partisipan sebagai pemilih. Selain itu keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara: a) Agar dapat mengelola kehidupan yang lebih baik, b) Dapat mengatur masyarakat sesuai yang diharapkan, c) Kepemimpinan yang memperjuangkan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, d) Ladang memenuhi kepentingan secara instan, e) agar dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat, agama dan bangsa, f) Kekuasaan yang berlandaskan niat kebaikan, g) Aktivitas untuk kebaikan, dan h) sebagai ruang untuk mengabdikan dan berdakwah.

Creswell menjelaskan tentang studi fenomenologi, bahwa fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala.⁸ Keterlibatan tuan guru dalam politik tidak terbentuk begitu saja. Bila mengacu pada pengertian fenomenologi tersebut, maka makna-makna tadi dihasilkan dari serangkaian alur atau proses pengalaman yang dijalani tuan guru dalam dunianya.

⁷ Yudin Citriadin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2017), 107

⁸ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*, (Bandung, Widya Padjajaran, 2009), 127

Menurut Schutz, manusia mengkonstruksikan makna di luar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. Hubungan antar makna pun diorganisasi melalui proses ini, atau biasa disebut stock of knowledge.⁹

Tuan guru yang terjun dalam politik praktis, memang cukup dilematis dan membawa banyak tantangan namun juga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat. Keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren diantaranya.

a. Aktivitas Dakwah

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren karena bagi tuan guru dakwah menjadi salah satu jalan dalam membangun ummat baik dengan ucapan maupun perbuatan. Namun untuk mendukung aktivitas dakwahnya dibutuhkan fasilitas seperti sarana dan ekonomi yang mapan. Tuan guru kadang kala merasa kesulitan untuk bisa menjalankan aktivitas dakwah dan kegiatan sosial keagamaannya di masyarakat. sehingga dibutuhkan fasilitas seperti kendaraan dan lain-lain yang dinilai merupakan suatu keharusan yang mesti dimiliki oleh para tuan guru. Hal tersebut ditujukan guna mempermudah proses mobilitas dari aktivitas dakwahnya di masyarakat.

Selain itu, banyak tuan guru yang berpartisipasi dalam politik praktis karena merasa bahwa jalur politik dapat memberikan legitimasi kekuasaan untuk menyiarkan islam dengan mudah kepada masyarakat secara lebih luas. Politik banyak digunakan oleh para tokoh agama seperti tuan guru sebagai salah satu alternatif atau medium untuk menyiarkan islam kepada masyarakat. Melalui kekuasaan tersebut, para tuan guru meyakini bahwa proses dakwah akan menjadi demikian lebih mudah untuk dilakukan.

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memperluas sasaran dakwah. Alasan lain yang melatar belakangi tuan guru untuk berpolitik praktis juga diketahui dikarenakan oleh keinginan untuk dapat melakukan ekspansi atau perluasan terhadap sasaran jama'ah dari kegiatan dakwah tuan guru sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan islam secara lebih luas. Ada tendensi kepentingan dari tuan guru melalui keterlibatannya dalam dunia politik tersebut untuk berusaha memperluas lingkup jama'ah dan organisasi keagamaan yang dimilikinya.

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memberikan nuansa islami dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Salah satu yang melatarbelakangi tuan guru untuk berpartisipasi dalam politik praktis adalah agar dapat ikut serta dalam proses perancangan peraturan atau kebijakan yang ada di pemerintah, baik melalui

⁹ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi...*,127

legislatif, yudikatif, atau eksekutif, untuk mengakomodir nilai-nilai islam di dalam kebijakan atau peraturan pemerintah tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara. Tidak ada sumber dana bagi pondok pesantren menjadi perhatian bagi tuan guru. Masuknya tuan guru dalam lingkup kekuasaan tidak jarang didasari oleh keinginan agar aspirasi dari pondok pesantrennya dapat terwakili di pemerintahan. Realitas dari pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang kerap diabaikan nasibnya oleh pemerintah perihal akses sumber-sumber materil dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, mendorong tuan guru untuk bertindak dengan mengambil bagian dalam pemerintahan itu sendiri agar terakomodirnya dana khusus bagi pondok pesantren mereka.

Selain itu, minimnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan bantuan anggaran bagi lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren menyebabkan proses pembangunan pondok pesantren menjadi sangat lambat. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan latarbelakang tuan guru untuk masuk dalam politik kekuasaan. Karena terkadang untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dari lembaga pondok pesantrennya tidak jarang tuan guru terpaksa harus bergantung pada sumber dana bersama dari masyarakat.

c. Membantu Masyarakat

Membantu masyarakat supaya lebih maju dan sejahtera menjadi salag satu alasan keterlibatan tuan guru dalam politik dan pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara. Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren adalah untuk membangun dan mengembangkan masyarakat agar lebih maju, sejahtera dan mandiri.¹⁰ Lebih jauh dijelaskan bahwa keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memperoleh keuntungan finansial yang diniatkan dan dihajatkan untuk kepentingan masyarakat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren bisa membantu persoalan pendidikan dari lembaga pondok pesantren yang dimiliki dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang tidak mampu dan bisa menyantuni para dhoif, dhuafa, dan anak yatim dari keuntungan ekonomi yang didapatkan selama berpolitik.

d. Faktor Pengalaman

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten

¹⁰ Wawancara , tanggal 29 Mei 2021

Lombok Utara adalah karena pengalaman tuan guru yang selalu menjadi korban politik tidak lepas dari pengalaman tuan guru yang sering kali menjadi korban kebohongan janji politik dalam setiap kali pemilihan kepala daerah. Basis jama'ah yang besar serta pengaruh ketokohnya yang kuat dalam suatu kelompok masyarakat menyebabkan tuan guru kerap menjadi incaran para politisi untuk memuluskan kepentingan mereka.

Selain itu juga, karena adanya kekhawatiran pribadi tuan guru pada sikap para politisi yang tidak mencerminkan cara berpolitik yang baik sehingga merusak marwah dari politik itu sendiri. Hal inilah yang kemudian banyak mendorong tuan guru untuk masuk dalam politik kekuasaan, yaitu untuk memastikan bahwa politik dipegang oleh orang-orang yang benar-benar mampu menjalankan fungsi politik tersebut sebagaimana mestinya. Bukan dengan iming-iming janji yang berujung pada kebohongan, namun menciptakan politik yang jujur dan adil sebagai media untuk mewujudkan aspirasi, cita-cita maupun harapan dan yang utama untuk memberikan manfaat kebaikan bagi hidup manusia.

Tuan guru menilai bahwa maraknya kasus korupsi dan kasus amoral lainnya yang dialami oleh para politisi dikarenakan 'absennya' peran dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu dalam berpolitik. Inilah alasan tuan guru masuk dalam politik kekuasaan sebagai upaya memperbaiki 'image' kekuasaan sebelumnya yang dinilai 'kotor' dan wujud memperjuangkan agama dan perlunya menghadirkan figur pemimpin masyarakat yang baik sosial dan spiritualnya. Sehingga tuan guru sebagai figur ulama yang dinilai mencerminkan nilai-nilai keagamaan tersebut, dirasakan perlu untuk ikut terlibat dalam politik kekuasaan.

Faktor penyebab keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren ini dijelaskan bahwa keterlibatan tuan guru dalam politik disebabkan karena: a) Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat, b) Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Untuk mengejar kepentingan ini manusia harus memiliki kekuasaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran, c) Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan, d) Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap system politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluatif yang mendasari perilaku politik.¹¹

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren dikarenakan

¹¹ Khoiru Ummatin, *Perilaku Politik Kiyai*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 37

tuan guru menjadi sosok elit sosio kultural dalam masyarakat. Hal itulah yang terjadi di Lombok. Dari sejarah sosio kultural, Tuan Guru memegang peranan penting dalam berbagai aspek baik agama, sosial, budaya, dan politik. Ucapan yang keluar dari mulut Tuan Guru mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.¹² Sedangkan kesetiaan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa ketundukan, penghormatan, dan kepatuhan, Tuan guru adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Sasak kepada seseorang karena memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Kapasitas tuan guru di tengah-tengah masyarakat Lombok sangatlah kompleks dan serbaguna. Tuan Guru bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, Tuan Guru juga bisa berperan sebagai psikater yaitu tempat konsultasi masyarakat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, baik permasalahan ekonomi, permasalahan tanah warisan permasalahan rumah tangga permasalahan jodoh sampai ke permasalahan kesehatan.¹³

Keterlibatan politik tuan guru baik sebagai ulama' dan umara' dan lainnya tidak lepas dari beberapa peran yang ada pada dirinya yaitu tuan guru sebagai ulama dan tuan guru sebagai penggerak perubahan dan kemandirian kemasyarakatan.

2. Dampak Keterlibatan Tuan Guru Dalam Politik di Pondok Pesantren

Tuan guru sebagai figur atau tokoh yang terlibat dalam dunia politik tentu memiliki banyak dampak bagi perubahan sosial kemasyarakatan baik dibidang pendidikan, sosial, dakwah dan bidang lainnya. Oleh karena itu seorang Tuan Guru dituntut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi politik masyarakat dibidang politik masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sikap dan tingkat kesadaran masyarakat dalam organisasi politik. Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren diantaranya:

a. Menjadi lebih waspada atau mawas diri

Dalam hal ini, dampak keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara tuan guru menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada dan selalu menyenandungkan tentang kemenangan, apalagi dalam dunia politik terkenal prinsip "membunuh lawan atau terbunuh oleh lawan". Artinya, seorang politisi tidak bisa hanya berdiam diri. Tanpa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan posisi politiknya. Seorang politisi di tuntut untuk cerdik dan cerdas dalam memainkan intrik politik sehingga tidak akan

¹² Jamaludin, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak Terhadap Tuan Guru* (Yogyakarta: CRCs-Sekolah Pascasarjana UGM-Depag RI, 2007), h. 7

¹³ Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Tuan guru di Anatara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Muri* (Amsterdam: VU University Press, 1994), 124

terkalahkan oleh lawan.¹⁴

Kondisi yang demikian tentu saja berlawanan dengan karakter seorang tuan guru. Nilai-nilai moralitas dan kejujuran yang menjadi ciri khas seorang tuan guru sangat tidak memungkinkan terlibat dalam dunia politik yang sarat dengan intrik. Bisa jadi, dunia politik bagi tuan guru sama halnya dengan masuk ke mulut singa yang akan meruntuhkan segala jati diri yang di sandang. Mungkinkah tuan guru berbohong, saling fitnah, saling jatuhmenjatuhkan karena merebut jabatan politik.

Bagi seorang tuan guru perilaku tersebut tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi bagi seorang politisi perilaku tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi seorang politisi selalu mendewakan kemenangan, bisa jadi akan dicapai dengan cara-cara yang baik atau kurang baik. Di sinilah intrik politik untuk selalu menang akan terus bekerja.

b. Lebih Menjaga Kesederhanaan dan Religiusitas

Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara yang pada awalnya akrab dengan aksesoris “sarung” sebagai simbol kesederhanaan dan religiusitas, akhirnya beralih ke aksesoris yang melambangkan kaum elitis yang jauh dari kesederhanaan masyarakat bawah. Bahkan, kopiah dan songkok yang menjadi identitas kultural tuan guru mulai hilang di telan oleh posisinya sebagai kaum birokrat. Melepas kopiah yang sebelumnya menjadi sesuatu yang tabu, karena bagi masyarakat tradisional telah mengakar dalam benak mereka bahwa memakai kopiah (tidak membuka kepala) merupakan bagian dari akhlak, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh para tuan guru.

Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren sering kali menunjukkan tuan guru yang pada awalnya sangat menjaga penampilan (minimal tetap dengan kopiah) sering kali tampil di depan publik dengan melepaskan identitasnya “kopiahnya”. Tanpa disadari mereka telah mulai kehilangan identitas dan nilai-nilai kulturalnya. Sikap tersebut sedikit demi sedikit dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tuan guru tersebut. Apalagi di tengah-tengah masyarakat, tuan guru notabene telah di posisikan sebagai figur suci, layaknya kertas putih yang sangat putih, apabila ia terkena setitik warna hitam akan menjadi noda yang sangat kentara.

Tuan guru memiliki beberapa tipe dalam mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu: a) Tuan guru Langgar, yaitu tuan guru yang mengajar para santri di langgar atau di mushola kecil. Biasanya tuan guru ini tinggal di desa-desa yang tidak memiliki pondok pesantren yang dihuni oleh para santrinya, tetapi tuan guru ini mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sekitar, b) Tuan guru Pesantren, yaitu tuan guru yang mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh para santri yang menuntut ilmu agama

¹⁴ Wawancara, tanggal 16 Juni 2021

dari pelosok kampung. Di pondok pesantren inilah seorang tuan guru mengajarkan berbagai kitab klasik kepada para santrinya, c) Tuan guru Mubaligh, yaitu tuan guru yang melaksanakan dakwah dan pengajian di desa-desa dan tempat lain. Biasanya tuan guru ini tidak memiliki pondok pesantren layaknya tuan guru pesantren lainnya, d) Tuan guru Politik, yaitu tuan guru yang banyak terjun kedalam politik praktis meskipun dia menyempatkan diri dalam proses pembelajaran di madrasah dan pesantren, e) Tuan guru Madrasah, yaitu tuan guru yang tugas dan pekerjaannya adalah mengajar para santri di madrasah.¹⁵

Dalam realitannya, tuan guru memiliki wajah tidak tunggal, artinya tidak hanya tuan guru pondok pesantren, sebab seorang tuan guru tidak hanya mempunyai satu kapasitas saja, terkadang lebih dari satu kapasitas. Mungkin tuan guru itu termasuk tuan guru pesantren namun dia juga sangat disegani dalam dunia politik. Ada juga tuan guru yang aktif dalam kegiatan dakwah dari kampung ke kampung, tetapi dia juga sebagai Mursid salah satu aliran tarekat. Bahkan terkadang ada satu tuan guru yang memiliki semua kriteria tuan guru seperti yang diatas. Artinya tuan guru itu pantas menyandang keempat kriteria tuan guru diatas. Disamping tuan guru tersebut memiliki pesantren, dia juga aktif dakwah keliling daerah, aktif dalam politik praktis dan juga dia sebagai mursid salah satu aliran tarekat termasuk tuan guru di madrasah.

3. Kendala Yang Dihadapi Tuan Guru Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia yang diatur dan diakui oleh pemerintah. Secara historis kemunculan pondok pesantren tersebut mempunyai ciri khas tersendiri antara lembaga yang satu dengan lainnya. Sebagai sebuah system pendidikan islam mempunyai komponen input, proses dan output. Ketiga komponen tersebut harus dikelola dan diatur dengan manajemen yang professional untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dalam pengelolaannya pondok pesantren tersebut selalu dihadapkan dengan berbagai problem dalam pengembangannya, baik dari dalam maupun dari luar. Identifikasi terhadap problematika yang ada merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan secara terus-menerus terhadap kualitas lembaga pondok pesantren tersebut. Kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren diantaranya

Pertama: Masalah Kenakalan Santri (santri). Kenakalan santri merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Kenakalan santri tersebut seperti adanya santri yang tidak mentaati kode etika pondok pesantren. Bahkan sebagian mereka acuh tak acuh terhadap kode etik (aturan) baik dalam berpakaian maupun lainnya yang diterapkan di pondok pesantren. Kenakalan santri dalam mengikuti dan

¹⁵ Eko Setiawan Kyai dalam Politik Ar-Risalah, Vol XIII No. 1 April 2014, 5

mentaati kode etik pondok pesantren dapat berdampak pada sikap dan perilaku yang tidak baik pada diri santri, sebab baik atau buruknya sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh santri dalam pondok pesantren akan mencerminkan kepribadian santri itu sendiri dan juga berdampak pada citra yang tidak baik pada pondok pesantren. Teman bergaul yang baik (tidak nakal) akan berpengaruh baik pada diri siswa, begitu pula sebaliknya teman bergaul yang tidak baik (nakal) akan berpengaruh buruk pada sikap dan perilaku santri¹⁶.

Kedua: Ketidaksiplinan santri. Ketidaksiplinan santri juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Ketidaksiplinan santri tersebut seperti santri tidak tepat waktu (terlambat) masuk sekolah, keluar pada saat jam pelajaran di sekolah. Di samping itu dalam kode etik anak didik juga masih kurang tertib, rapi dan sopan. Hal ini terlihat dari adanya santri yang menggunakan pakaian sekolah yang ketat (tidak longgar) dan sebagian ada yang tidak memasukkan baju ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah. Kedisiplinan ini adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab pada diri seseorang untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol tingkah laku dan sikap hidupnya agar seluruh keberadaannya tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri¹⁷.

Ketiga: Kurangnya motivasi belajar santri. Kurangnya motivasi belajar santri dalam proses pembelajaran juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren seperti memberikan nasehat dan semangat atau dorongan kepada santri untuk rajin belajar, memberikan penghargaan berupa hadiah bagi santri berprestasi yaitu bagi santri yang mendapat rangking satu, dua dan tiga, memberikan sanjungan atas hasil belajar dan tugas yang dapat dilakukan tepat pada waktunya. Motivasi belajar adalah keadaan internal organisme baik manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu atau bertindak laku secara terarah¹⁸.

Keempat: Lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Lingkungan yang tidak sehat seperti lingkungan pergaulan bebas dan sikap malas dalam belajar, tidak hormat kepada guru, tidak saling menghargai dan mengormati antar sesama teman, suka bermain pada waktu belajar serta mengganggu teman dalam belajar juga merupakan salah satu penghambat dalam manajemen mutu pendidikan Islam di pondok pesantren, sebab lingkungan yang tidak sehat ini menyebabkan sikap dan perilaku serta pola pikir anak didik menjadi rusak dan melakukan perbuatan yang negatif seperti melanggar kode etik atau norma-norma yang diterapkan di sekolah.

¹⁶ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2003), 71

¹⁷ Unaradjan, Dolet, Manajemen Disiplin (PT. Gramedia Indonesia: Jakarta, 2003), 1

¹⁸ Muhibbin, Syah, Psikologi Belajar (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2006), 151

Kelima: Kurangnya perhatian orang tua santri. Kurangnya perhatian orang tua santri juga menjadi kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren seperti kurangnya bimbingan dan arahan (nasihat) yang diberikan kepada anak didik terutama dalam belajar, kurang memberikan pendampingan dan kontrol terhadap belajar anak, kurangnya perhatian orang tua santri tersebut dapat menyebabkan anak didik memiliki sikap dan perilaku belajar yang tidak baik. Selain itu kurangnya perhatian orang tua santri juga karena kesibukan orang tua santri seperti mengurus rumah tangga, pergi ke kantor untuk kerja, sehingga anak didik kurang mendapat perhatian dari orang tua baik dalam belajar maupun dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dalam lingkungan keluarga adalah institusi pendidikan utama dan pertama bagi anak, sebab seorang anak pertama kali mengenal pendidikan dalam lingkungan melalui orang tua atau keluarga¹⁹.

Kenam: Kemampuan Ekonomi Orang Tua Santri. Lemahnya kemampuan ekonomi orang tua santri juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Kondisi ekonomi orang tua santri menjadi salah satu hambatan dalam manajemen mutu pendidikan Islam di madrasah. Selain itu, lemahnya ekonomi orang tua santri menyebabkan Pondok pesantren mengalami kesulitan terutama dalam merealisasikan program yang ada, meskipun dalam peraturan pemerintah santri yang tidak mampu akan ditanggung atau diberikan beasiswa, tetapi tidak semua santri yang diberikan beasiswa. Salah satu indikatornya tampak dari pekerjaan orang tua yang sebagian ada yang bekerja sebagai guru, petani, buruh, pejabat dan lainnya. Artinya tidak semua orang tua santri yang ada di Pondok pesantren memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi tetapi ada yang tingkat ekonominya tinggi, sedang dan rendah dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakmampuan keluarga anak didik sangat mempengaruhi pendidikan anak didik untuk membiayai segala proses dan kebutuhan yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam suatu jangka tertentu²⁰. Jadi, kondisi ekonomi keluarga sangat menentukan kelanjutan pendidikan anak didik. Kondisi belajar anak yang tidak memadai juga sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.

KESIMPULAN

Bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren dapat dilihat sebagai pengurus struktural partai politik, keterlibatan tuan guru sebagai calon legislatif dan eksekutif, wujud dukungan suara yang diberikan oleh tuan guru biasanya diberikan kepada

¹⁹ Rehani, Revolusi Belajar Berdasarkan Al Qur'an (PT. Rosda Karya: Bandung, 2003), 129, 26

²⁰ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Rineka Cipta: Jakarta, 2003), 56

calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan politik tuan guru memiliki orientasi yaitu orientasi pragmatis adalah dimana Tuan guru memosisikan dirinya sebagai “elit lokal” dan orientasi pragmatis seperti tidaklah mudah dilihat dan diteliti. Keterlibatan politik praktis tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren juga dilakukan dengan melakukan politik praktis yaitu tuan guru terjun langsung ke gelanggang pilkada, melakukan politik tidak langsung. Selain itu juga keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren karena panggilan dakwah, faktor ekonomi, membantu masyarakat dan faktor pengalaman.

Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren adalah meningkatnya status sosial, dapat bermanfaat secara lebih luas kepada masyarakat dan menumbuhkan wawasan dan pengalaman baru. Menjadi lebih waspada atau mawas diri dimana tuan guru menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada dimana dunia politik terkenal prinsip “membunuh lawan atau terbunuh oleh lawan. Kemudian lebih menjaga kesederhanaan dan religiusitas. Biasanya tuan guru akrab dengan cirri khasnya yang sholeh dan islami sebagai simbol kesederhanaan dan religiusitas, akhirnya beralih ke aksesori yang melambangkan kaum elitis yang jauh dari kesederhanaan masyarakat bawah

Kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini pengelolaan pondok pesantren oleh tuan guru di Kabupaten Lombok Utara dimulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating) dan pengawasan (controlling). Sedangkan kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara masalah kenakalan santri (santri), ketidakdisiplinan santri, kurangnya motivasi belajar santri, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kurangnya perhatian orang tua santri dan kemampuan ekonomi orang tua santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., (2009). *Mengislamkan kursi dan meja: dialektika ulama dan kekuasaan*, Pustaka Pelajar.
- Anwar. (2013). *Dinamika Peran Politik Tuan Guru Di Lombok Era Reformasi*.
- Citriadin, Y., (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Dolet, U., (2003). *Manajemen Disiplin*, PT. Gramedia Indonesia: Jakarta.
- Faridl, M., (2003). Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 19 (2), 200–201, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i2>.
- Fealy, G., (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS.

- Fitriani, M., (2016). Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (1). <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.332>.
- Haramain, M., (2019). *Dakwah Moderasi Tuan Guru: Kajian Pemikiran dan Gerakan Dakwah Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abd. Madjid*" (IAIN Parepare Nusantara Press.
- Jamaludin. (2007). *Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak Terhadap Tuan Guru*
- Kuswarno, E., (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*. Bandung. Widya Padjajaran.
- Pradjarta, D., (1994) *Memelihara Umat, Tuan guru di Antara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Muri* Amsterdam: VU University Press.
- Putrawan, A. D., (2017). *Runtuhnya Karisma Tuan Guru*, Mataram.
- Rehani. (2003). *Revolusi Belajar Berdasarkan Al Qur'an*. PT. Rosda Karya: Bandung.
- Setiawan, E., (2014). Kyai dalam Politik. *Ar-Risalah*, Vol XIII No. 1 April.
- Slameto. (2003) *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Subiyakto, R., *Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada*, t.t
- Sulistyo, H., & Suaedy, A., (2000). *Kyai & demokrasi: sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu, dan partai politik* (Diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Surbakti, R., (1992) *Memahami ilmu politik*, Grasindo.
- Syah, M., (2006) *Psikologi Belajar*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ummatin, K., (2002). *Perilaku Politik Kiyai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BEGURU: Menggali Prinsip-Prinsip Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kearifan Lokal Sasak

Lalu Sumardi¹, M. Ismail², Rispawati³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

email: ¹lalu.unram@gmail.com, ²ismail.fkip@gmail.com, ³rispa64@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has a very complex ethnic anatomy, one of which is the Sasak tribe. Sasak tribe has a wealth of culture that surrounds all dimensions of life including the education sector. The purpose of this research is to explore the principles of beguru in preparing educational facilities and infrastructure. This study used a naturalistic approach with ethnography types. Data collection was done using ethnographic interview techniques. To maintain the validity of the data, triangulation of data sources and time is carried out. The collected data was further analyzed using an interactive model described by Miles, Huberman, & Saldana which consists of three stages, namely; data condensation, data display, and conclusion. Based on the analysis technique found 3 (three) principles of beguru in the preparation of educational facilities and infrastructure, namely; principles of comfort and tranquility, principles of availability and readiness, and principles of conformity to the needs or types of fields of science. These principles are fundamental and universal because they are preconditions for the creation of quality education and learning and can be applied to all pathways, types, and levels of education. Therefore, these principles can be a role of the conduct in choosing and determining educational facilities and infrastructure.

Keywords: Beguru, Local wisdom, Principles, Facilities and infrastructure

ABSTRAK

Bangsa Indonesia memiliki anatomi suku bangsa yang sangat kompleks salah satunya adalah suku Sasak. Suku Sasak memiliki hazanah budaya yang melingkupi semua dimensi kehidupan salah satunya dalam sektor pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip *beguru* dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *naturalistic* dengan jenis penelitian etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara etnografi. Untuk menjaga validitas data dilakukan triangulasi sumber data dan waktu. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, & Saldana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu; kondensasi data, *display* data, dan penarikan simpulan. Berdasarkan teknik analisis tersebut ditemukan 3 (tiga) prinsip *beguru* dalam penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu; prinsip kenyamanan dan ketenangan, prinsip ketersediaan dan kesiapan, dan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau jenis bidang ilmu. Prinsip-prinsip tersebut bersifat fundamental dan universal karena menjadi prakondisi terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan dapat diterapkan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi *role of the conduct* dalam memilih dan menentukan sarana dan prasarana pendidikan.

Kata kunci: Beguru, Kearifan lokal, Prinsip, Sarana dan prasarana

Submitted: 17 Februari 2022	Revised: 20 April 2022	Accepted: 7 Mei 2022
Final Proof Received: 20 Mei 2022	Published: 30 Juni 2022	

How to cite (in APA style):

Sumardi, L., Ismail, M., & Rispawati. (2022). *BEGURU: Menggali Prinsip-Prinsip Penyiapkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kearifan Lokal Sasak. Schemata*, 11 (1), 39-54.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki anatomi suku bangsa yang sangat kompleks. Dari data statistik yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2010 ada 1.331 suku bangsa yang menyusun struktur sosial bangsa Indonesia¹. Salah satu suku bangsa pembentuk struktur anatomi bangsa Indonesia adalah suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Suku Sasak merupakan kelompok terbesar yang ada di NTB. Dari 5.320.092 jumlah penduduk NTB² lebih dari 66% adalah suku Sasak³. Seperti suku bangsa yang lain, suku Sasak menjadikan budaya mereka sebagai salah satu sumber nilai utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka⁴. Ini artinya budaya Sasak mewarnai sebagian besar aspek kehidupan di daerah tersebut.

Sebagaimana suku bangsa yang ada di Indonesia, suku Sasak memiliki hazanah budaya yang melingkupi semua dimensi kehidupan salah satunya dalam sektor pendidikan. Budaya masyarakat Sasak pada sektor tersebut terepresentasikan dalam satu sistem pendidikan yang disebut dengan “*beguru*”. Menurut akademisi sekaligus ahli budaya Sasak, Adi Fadli⁵ *beguru* merupakan salah satu budaya masyarakat Sasak yang sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa *beguru* merupakan satu sistem pendidikan yang menggambarkan bagaimana pendidikan dijalankan dalam masyarakat Sasak. Dalam pandangan⁶ *beguru* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Sasak yang termasuk dalam kategori sistem sosial. Dengan mempelajari *buguru* kita akan dapat mengetahui dengan baik unsur-unsur dan proses pendidikan dalam masyarakat tersebut. Selain itu, dengan mempelajari konsep *beguru* maka kita dapat memahami prinsip-prinsip edukatif yang ada di setiap tahapan

¹ BPS, “Mengulik Data Suku di Indonesia”, dalam bps.go.id, 2022.

² BPS NTB, “Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2010-2020”, dalam ntb.bps.go.id, 2020.

³ Rimbakita, “Suku Sasak-Sejarah, Bahasa, Kepercayaan, Adat Istiadat & Kebudayaan”, dalam rimbakita.com, 2019.

⁴ Lalu Sumardi dan Farida Hanum, “Social Mobility and New Form of Social Stratification: Study in Sasak Tribe, Indonesia” dalam Jurnal International Journal of Scientific & Technology Research, 8(10), 2019, hal. 708-712.

⁵ Wawancara dengan Adi Fadli, Tanggal 6 Februari 2021 di UIN Mataram.

⁶ Warni Djuwita, Psikologi Perkembangan: Stimulasi Aspek Perkembangan Anak dan Nilai Kearifan Lokal melalui Permainan Tradisional Sasak (Mataram: LKIM., 2011), hal. 120.

beguru. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi sumber nilai dan selanjutnya diadopsi dalam sistem pendidikan nasional kita.

Sistem *beguru* jika dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan sistem montesori, taman siswa, dan sistem surau yang ada di Sumatera Barat. Perbedaan yang paling nyata terlihat dari sistem-sistem tersebut adalah pada aspek ontologinya dimana sistem montesori dan taman siswa lahir dari gagasan cerdas seorang ilmuwan pendidikan⁷, sedangkan sistem surau lahir dari proses interaksi individu dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat⁸. Sama halnya dengan sistem surau, sistem *beguru* lahir dari proses budaya masyarakat Sasak. Karena sistem surau dan *beguru* merupakan produk budaya maka sudah pasti nilai-nilai dari masing-masing budaya masyarakat pembentuknya lekat dalam setiap unsur dari sistem tersebut. Nilai-nilai khas itu pulalah yang lekat dan mempengaruhi cara pikir, cara sikap, dan cara tindak setiap individu penggunaannya. Jadi, psikologi belajar anak-anak termasuk anak-anak Sasak sangat dipengaruhi oleh budaya mereka. Oleh sebab itu, budaya belajar yang seharusnya dibangun di sekolah-sekolah adalah budaya belajar yang sesuai dengan latar belakang budaya anak, dalam konteks penelitian ini adalah budaya Sasak.

Tidak hanya itu, sebagai suatu sistem pendidikan, kearifan lokal *beguru* juga berisi dan mengatur komponen-komponen lain pendidikan salah satunya adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dalam *beguru*, sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal penting yang harus disiapkan dengan baik sebelum *beguru* dilakukan. Tanpa kesiapan sarana dan prasarana maka *beguru* tidak dapat dilakukan. Jadi, seperti halnya pendidikan formal, *beguru* dalam masyarakat Sasak juga tidak bisa berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana. Dalam penyiapan sarana dan prasarana tersebut kearifan lokal *beguru* berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah menjadi pakem selama ini.

Berangkat dari argumentasi di atas penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *beguru* dalam penyiapan sarana dan prasarana. Kajian tentang kearifan lokal *beguru* khususnya tentang prinsip-prinsip dalam penyiapan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dilakukan karena syarat dengan nilai-nilai kebajikan lokal yang potensial diadaptasikan dalam pendidikan formal. Beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang

⁷ Elizabeth G. Hainstock, *Montessori untuk Sekolah Dasar* (PT. Pustaka Delapratasa, 2002), hal. 1-9. Ki Hajar Dewantara, *Kihajar Dewantara: Pemikiran, Konsep, Keteladanan, Sikap Merdeka*, I, Pendidikan (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013), hal. 2-3.

⁸ Mas'Ud Zein, "Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi, dan Literatur Keagamaan", dalam *Jurnal Sosial Budaya*, 8(01), 2011, hal. 25-39.

kearifan lokal membuktikan bahwa kearifan lokal termasuk kearifan lokal Sasak dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadi & Masnun⁹ menunjukkan kearifan lokal Sasak dapat menjadi instrumen mitigasi bencana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi dan Wahyudiati¹⁰ juga membuktikan kearifan lokal Sasak mampu menciptakan resiliensi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam konteks pendidikan, kearifan lokal dapat menjadi salah satu jalan atau solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Wahyudiati, dan Loise¹¹ membuktikan pembelajaran yang menggunakan kearifan lokal Sasak sebagai sumber belajar Kimia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Irwanto¹² membuktikan bahwa adaptasi kearifan lokal Sasak dalam model pembelajaran efektif dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi peserta didik. Begitu juga dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Astawan¹³ yang menguji model pembelajaran berbasis budaya *trikaya parisudha*, menunjukkan bahwa model pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal dalam hal ini *trikaya parisudha* efektif untuk meningkatkan keterampilan proses dan nilai-nilai karakter siswa.

Semua hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki berkontribusi positif dalam banyak aspek kehidupan. Hal ini disebabkan karena masyarakat menjadikan kearifan lokal sebagai *way of life* dalam kehidupan mereka. Jadi, kearifan lokal merupakan salah satu dasar filosofi pendidikan di Indonesia di samping Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Sumardi¹⁴. Karena posisi strategis tersebut maka kajian-

⁹ Adi Fadli & Masnun, "The Earthquake Risk Management Model Based on Sasak' Local Wisdom", dalam *Jurnal Disaster Advances*, 13(3), 2020, hal. 54-61.

¹⁰ Lalu Sumardi & Dwi Wahyudiati, "Using Local Wisdom to Foster Community Resilience During the Covid-19 Pandemic: A Study in the Sasak Community, Indonesia", dalam *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 556, 2020, hal. 122-127.

¹¹ Hari Sutrisno, Dwi Wahyudiati, & Yosana I. S. Louis, "Ethnochemistry in the Chemistry Curriculum in Higher Education: Exploring Chemistry Learning Resources in Sasak Local Wisdom" dalam *Jurnal Universal Journal of Educational Research*, 8(12A), 2020, hal. 7833-7842.

¹² Adi Fadli & Irwanto, "The Effect of Local Wisdom-Based ELSII Learning Model on the Problem Solving and Communication Skills of Pre-Service Islamic Teachers", dalam *International Journal of Instruction*, 13(1), 2020, hal. 731-746.

¹³ Gusti Astawan, "Pengembangan Model Pembelajaran Trikaya Parisudha untuk Meningkatkan Keterampilan Proses dan Nilai-nilai Karakter di Sekolah Dasar", *Disertasi Pascasarjana* UNY, Yogyakarta, 2018, hal. 178.

¹⁴ Lalu Sumardi, "Pancasila: The Educational Philosophy Alternative from Indonesia for the World", dalam *Journal of Education and Practice*, 11(11), 2020, hal. 89-96.

kajian tentang kearifan lokal selalu relevan dan urgen untuk terus dilakukan. Dari kajian-kajian tersebut akan diperoleh konsep-konsep, prinsip-prinsip, bahkan teori-teori yang dapat menjadi pedoman dan landasan dalam menjalankan aktivitas dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam sektor pendidikan. Urgensi kearifan lokal dalam mengatasi permasalahan pendidikan khususnya pembelajaran juga pernah dikemukakan oleh Vigotsky¹⁵ dengan mengatakan bahwa budaya sangat mempengaruhi mental individu dan oleh karenanya pembelajaran yang dilakukan guru harus sejalan dengan budaya peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan jenis etnografi. Menurut Spradley¹⁶ penelitian etnografi merupakan penelitian yang mengkaji kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu. Dalam konteks penelitian ini kebudayaan masyarakat yang akan didalami adalah kebudayaan masyarakat Sasak Lombok, yaitu *beguru*.

Informan penelitian ini adalah mereka yang pernah terlibat dalam prosesi *beguru*, yaitu; peserta didik dan pendidik. Informan dalam penelitian etnografi menurut Spradley¹⁷ menjadi kunci untuk menghasilkan deskripsi kebudayaan. Begitu juga dalam penelitian ini informan merupakan sumber informasi untuk mengungkap prinsip-prinsip *beguru* dalam masyarakat Sasak. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan informan dalam penelitian adalah teknik bola salju (*snowball*). Dengan teknik tersebut peneliti pertama-tama akan mencari dan menemukan informan kunci berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar dan informan berikutnya akan diperoleh dari informan kunci. Proses penentuan informan akan berproses seperti itu sampai data dirasakan cukup.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik, yaitu; teknik wawancara dan teknik observasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang pertanyaannya mengandung jawaban yang terbuka¹⁸. Dengan teknik tersebut peneliti hanya membuat topik-topik yang akan ditanyakan dan pertanyaan-pertanyaan elaboratifnya akan diajukan sesuai dengan jawaban dari informan. Sedangkan teknik observasi yang akan

¹⁵ Warni Djuwita, Psikologi Perkembangan: Stimulasi Aspek Perkembangan Anak dan Nilai Kearifan Lokal melalui Permainan Tradisional Sasak (Mataram: LKIM., 2011), hal. 117-18.

¹⁶ James P. Spradley, Metode Etnografi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hal. 1.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model Miles & Huberman, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philipp Mayring, Program Komputer NVivo (PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 51.

digunakan adalah observasi non-partisipan dimana peneliti hanya mengamati lokasi *beguru* tanpa terlibat di dalamnya¹⁹.

Adapun analisis data penelitian dilakukan menggunakan teknik analisis model interaktif. Teknik analisis ini dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana²⁰ dengan tiga tahapan analisis, yaitu; kondensasi data, display data, dan merumuskan kesimpulan. Kondensasi data merupakan kegiatan memilih data, menfokuskan data, menyederhanakan data, mengabstraksi data, dan mentransformasi data. Proses tersebut dilakukan mulai sejak pengumpulan data penelitian sampai pemaparan data dilakukan. Tahapan analisis yang kedua adalah mengorganisasi data dalam topik-topik dan disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan mengambil kesimpulan. Tahapan analisis yang terakhir dilakukan adalah merumuskan simpulan dan menverifikasinya sehingga simpulan tersebut akurat.

HASIL

Dalam pendidikan salah satu unsur atau komponen yang harus ada adalah sarana dan prasarana. Prasarana merupakan unsur yang mutlak ada karena setiap individu termasuk peserta didik eksis dalam tempat dan ruang. Tidak ada orang yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, bahkan dapat dikatakan individu menyatu dengan ruang dan waktu. Begitu juga berkaitan dengan sarana pendidikan, ada sarana yang wajib ada dan ada sarana yang sebaiknya ada.

Dalam konteks rumusan penelitian ini, yaitu bagaimana prinsip-prinsip dalam memilih dan menentukan sarana dan prasarana dalam *buguru* pada masyarakat Sasak ditemukan 3 (tiga) prinsip, yaitu; prinsip kenyamanan dan ketenangan, prinsip ketersediaan dan kesiapan, dan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau jenis bidang ilmu. Dari ketiga prinsip di atas 1 (satu) prinsip termasuk prinsip dalam memilih dan menentukan prasarana pendidikan dan 2 (dua) prinsip merupakan prinsip dalam memilih dan menentukan sarana pendidikan.

Pertama, prinsip kenyamanan dan ketenangan yaitu prinsip pemilihan lokasi pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan ketenangan dalam proses jalannya pendidikan. Masyarakat Sasak dalam menentukan lokasi *beguru* menjadikan aspek

¹⁹ Ibid

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methodes Sourcebook* (SAGE Publication, Inc., 2014), hal. 8-10.

kenyamanan dan ketenangan menjadi prasyarat dalam menentukan, memilih, dan memutuskan dimana selayaknya dan sebaiknya *beguru* dilakukan. Untuk mendapatkan lokasi yang nyaman dan tenang masyarakat Sasak menggunakan 2 (dua) ketentuan, yaitu; ketentuan jarak dan ketentuan keramaian. Ketentuan jarak yang disyaratkan dalam *beguru* adalah lokasi yang dipilih harus jauh dari rumah penduduk dan jangkauan masyarakat. Adapun ketentuan keramaian yang disyaratkan adalah lokasi *beguru* harus sangat minim bahkan nihil dari hiruk pikuk aktivitas masyarakat.

Pemilihan lokasi *beguru* sebagaimana dikemukakan di atas didasari atas tiga alasan, yaitu; agar peserta didik tidak terganggu dalam proses pembelajaran, agar konsentrasi peserta didik dalam belajar tetap terjaga, dan peserta didik mudah dalam menguasai ilmu yang dipelajarinya. Prinsip kenyamanan dan ketenangan dalam memilih dan menentukan lokasi *beguru* sebagaimana diilustrasikan di atas tergambar dalam penjelasan informan di bawah:

Pada saat bertapa murid harus menentukan tempat bertapa yang jauh dari keramaian dan jauh dari masyarakat. Intinya, tempatnya harus benar-benar sepi. Alasannya adalah agar selama bertapa murid akan lebih mudah menguasai ilmu yang dipelajari karena memiliki konsentrasi yang lebih tinggi (I.2).

Penjelasan informan di atas sejalan juga dengan uraian yang dikemukakan oleh informan lain yang mengatakan; Begitupula dengan tempat bertapa harus di tempat yang sepi dan jauh dari kebisingan dan rumah penduduk. Alasannya karena pertama bahwa *beguru* merupakan suatu hal yang rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian penentuan tempat yang sepi dan jauh dari keramaian dimaksudkan untuk mempermudah murid dalam menguasai ilmunya. Selain itu, di tempat yang sepi dipercaya bahwa akan meningkatkan konsentrasi murid dalam belajar (I.1).

Dari sampel informasi yang dikemukakan oleh informan-informan di atas nampak jelas bahwa pemilihan lokasi *beguru* dalam masyarakat Sasak tidak boleh sembarangan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat *beguru* harus memenuhi prakondisi yang dapat menciptakan suasana nyaman dan tenang yang mendukung kondusifitas pembelajaran. Harapannya tidak lain agar proses pembelajaran berlangsung dengan tenang dan efektif.

Kedua, prinsip ketersediaan dan kesiapan berkaitan dengan ada tidaknya sarana yang dibutuhkan dan apakah sarana yang tersedia siap digunakan atau tidak. Pada kegiatan *beguru* dalam masyarakat Sasak, ketersediaan sarana penunjang *beguru* menjadi unsur penting yang harus disiapkan. Selain tersedia, sarana tersebut juga harus siap untuk digunakan. Seperti

dijelaskan di atas tersedia berkaitan dengan keberadaan dari unsur (aksestensi), sedang kesiapan berkaitan dengan bisa tidaknya sarana digunakan saat dibutuhkan (fungsionalisasi).

Unsur sarana dalam *beguru* dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu; sarana yang bersifat wajib ada dan sarana yang sebaiknya ada. Yang dimaksud dengan sarana yang bersifat wajib ada adalah sarana/alat/perlengkapan pembelajaran yang tanpa ketersediaan sarana tersebut kegiatan *beguru* tidak bisa dilakukan. Karena sifatnya tersebut maka sarana-sarana tersebut harus diadakan sebelum proses pembelajaran dilakukan. Adapun sarana yang sebaiknya ada merupakan sarana yang tanpa ketersediaan sarana tersebut kegiatan proses pembelajaran tetap bisa dimulai dan dilanjutkan, tetapi berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Prinsip ketersediaan dan kesiapan sarana dalam kegiatan *beguru* dalam masyarakat Sasak tergambar dalam penjelasan informan di bawah:

Harus bertanya kepada orang lain yang pernah *beguru* kepada guru tersebut mengenai syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Kemudian setelah itu murid menyiapkan *andang-andang* (seserahan) yang akan diserahkan kepada guru, dan sifat *andang-andang* itu wajib. Isi yang wajib ada pada *andang-andang* tersebut yaitu; beras, daun sirih, buah pinang, benang *stuken*, uang bolong, emas, dan kain putih. Untuk kain putih ukurannya sekitar 1,5 meter – 2,5 meter, ini semua merupakan isi wajib *andang-andang* (seserahan) (I.1).

Penjelasan yang hampir sama juga dikemukakan oleh informan lain dari penelitian ini sebagaimana dideskripsikan di bawah;

Hal yang harus disiapkan dalam pelaksanaan *beguru* yaitu; *sapug-dodot* dan beras benang. *Sapug dodot* ini merupakan pakaian yang harus dikenakan saat melaksanakan proses *beguru*. *Sapug* sebagai penutup kepala, *dodot* sebagai sarung, dan baju sebagai penutup aurat. Sedangkan *beras benang* merupakan syarat pertama dan syarat akhir penerimaan ilmu. Penyerahan *beras benang* yang pertama sebagai syarat penerimaan ilmu dan penyerahan yang terakhir sebagai rasa terima kasih pada guru. Sebelum penerimaan ilmu, penyerahan *beras benang* diawali dengan membaca basmalah, bersuci (wudhu). Isi *beras benag* terdiri dari pengosak, beras, benang *gantihan* (benang putih), uang bolong, uang kertas, daun sirih, buah pinang, dan apur (I.5).

Contoh penjelasan informan di atas secara nyata menggambarkan bahwa dalam *beguru* harus ada syarat sarana yang perlu dipenuhi sebelum proses *beguru* dilakukan. Tanpa ketersediaan dan kesiapan unsur sarana tersebut maka kegiatan *beguru* tidak bisa berjalan dan atau paling tidak kegiatan *beguru* tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ketiga, prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau jenis bidang ilmu berkaitan dengan jenis sarana yang diadakan harus mendukung pengembangan ilmu yang dialami. Dalam *beguru* prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengadaan sarana dimana alat yang disiapkan

harus disesuaikan dengan jenis ilmu yang akan dipelajari. Jadi, sarana yang dibutuhkan tidak sama antara satu bidang yang dipelajari dengan bidang yang lain. Karena variasi tersebut maka sekolah harus mengetahui dengan baik sarana yang dibutuhkan dalam mendukung proses pendidikan. Prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau jenis bidang ilmu sebagaimana dijelaskan di atas tergambar dalam penjelasan sebagaimana diilustrasikan di bawah:

Namun, ada isi lain dari *andang-andang* (seserahan) yang tergantung dari ilmu yang akan digurui. Seperti tambahan ayam kecil untuk ilmu pelet dan *maje* (pisau kecil yang diujungnya sangat runcing) yang biasanya untuk ilmu pengobatan (I.1).

Penjelasan serupa yang menggambarkan prinsip tersebut juga terlihat jelas dari uraian informan di bawah:

Semua yang tadi saya sebutkan harus ada dalam *andang-andang* (seserahan) yang akan diberikan kepada guru. Namun, ada beberapa isian khusus yang harus ditambahkan pada ilmu-ilmu tertentu. Tambahannya seperti ayam (I.2).

Penjelasan informan sebagaimana dinarasikan di atas menunjukkan bahwa pengadaan sarana/alat pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam *beguru*, kebutuhan yang dimaksud adalah sarana/alat yang disiapkan sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajari. Sarana/alat tersebut merupakan sarana yang bersifat urgen ada dalam mempelajari ilmu tersebut. Tanpa adanya syarat dimaksud maka proses pembelajaran bidang ilmu tersebut tidak dapat dilakukan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana dijelaskan di bagian temuan penelitian, ditemukan tiga prinsip dalam *beguru* berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Ketiga prinsip tersebut satu diantaranya merupakan prinsip dalam memilih dan menentukan prasarana pendidikan, yaitu prinsip kenyamanan & ketenangan dan dua lainnya merupakan prinsip dalam memilih dan menentukan sarana pendidikan, yaitu; prinsip ketersediaan & kesiapan dan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan.

Prasarana pendidikan merupakan prasyarat dapat berlangsungnya pendidikan. Secara logis dapat dikatakan dan diterima bahwa semua orang selalu dan pasti terikat dengan tempat. Orang hidup, beraktivitas, dan eksis dalam tempat. Oleh sebab itu, tidak ada satu orang pun yang tidak terikat oleh ruang atau tempat, termasuk juga dalam sektor pendidikan. Selain prasarana, pendidikan juga membutuhkan sarana yang memadai dan fungsional. Kelengkapan prasarana dan sarana yang memadai dan fungsional sangat menentukan kualitas

proses dan hasil belajar. Martin & Fuad²¹ dan Ananda & Banurea²² mengatakan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting yang menunjang dan menentukan program pendidikan. Dalam pandangan Dewey²³ sarana pendidikan ibarat alat bagi petani dalam menggarap ladangnya. Kelengkapan dan kualitas alat yang dimiliki oleh petani sangat menentukan proses penyelesaian pekerjaan dan kualitas hasil dari proses yang dilakukan.

Karena begitu pentingnya keberadaan prasarana dan sarana dalam menunjang keberhasilan pendidikan maka setiap penyelenggara pendidikan harus mampu memilih dan menentukan prasarana dan sarana yang tepat dan memadai. Dalam memilih dan menentukan prasarana dan sarana pendidikan seseorang harus memiliki prinsip-prinsip yang menjadi acuan sehingga pilihan yang diambil tepat dan mendukung. Dalam menentukan prasarana dan sarana pendidikan, kebijakan lokal masyarakat Sasak, *beguru* memberikan prinsip dalam memilih dan menentukan prasarana dan sarana. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman penyelenggara pendidikan saat ini dan di masa yang akan datang dalam memilih prasarana dan sarana pendidikan yang dikelolanya.

Prinsip *beguru* dalam pemilihan prasarana adalah prinsip kenyamanan & ketenangan. Prinsip ini mensyaratkan penyelenggara pendidikan harus menjadikan kenyamanan dan ketenangan menjadi pertimbangan utama dalam memilih lokasi penyelenggaraan pendidikan. Kenyamanan dan ketenangan dalam kebijakan lokal Sasak, *beguru* mensyaratkan jarak dan keramaian sebagai parameter dalam memutuskan nyaman & tenangnya lokasi pendidikan. Parameter jarak menunjuk pada posisi lokasi pendidikan yang jauh dari tempat tinggal dan tempat-tempat keramaian seperti pasar, hiburan, dan industri. Adapun parameter keramaian menunjuk pada kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas sosial dan ekonomi yang berlangsung. Jadi, jika pengelola pendidikan menginginkan lokasi pendidikan yang nyaman dan tenang maka lokasi yang dipilih harus jauh dari lokasi tempat tinggal dan pusat-pusat keramaian lainnya.

Kenyamanan dan ketenangan harus menjadi pertimbangan utama pengelola pendidikan dalam memilih dan menentukan posisi prasarana pendidikan, karena sangat

²¹ Martin dan Nurhayati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 1.

²² Rusydi Ananda, & Oda Kinanta Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Medan: CV Widya Pustaka, 2017), hal. 19.

²³ Douglas J. Simpson, Michael J. B. Jackson, & Judy C. Aycock, *John Dewey and the Art of Teaching: Toward Reflektive and Imaginative Practice* (California: Sage Publication, Inc., 2005), hal. 73-74.

menentukan proses dan hasil pendidikan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Dewe²⁴ bahwa kondisi lingkungan sekitar sangat menentukan dan berdampak terhadap keberlangsungan dan capaian belajar siswa. Secara spesifik tentang bagaimana dampak konsentrasi terhadap hasil belajar sudah dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Sampaio & Almeida²⁵ dan Erwiza & Kartiko²⁶ yang menyimpulkan bahwa konsentrasi belajar sangat berpengaruh dan menentukan hasil belajar siswa.

Adapun berkaitan dengan prinsip dalam menentukan sarana pendidikan dalam kebijakan lokal masyarakat Sasak ditemukan dua prinsip, yaitu: prinsip ketersediaan & kesiapan dan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau bidang ilmu. Pertama, Prinsip ketersediaan & kesiapan berkaitan dengan adanya alat kelengkapan yang dibutuhkan dalam pendidikan. Dalam *beguru* alat dan kelengkapan pendidikan menjadi syarat mutlak dapat berlangsungnya pendidikan. Tanpa adanya alat dan kelengkapan (sarana) yang dibutuhkan maka *beguru* tidak dapat dilangsungkan. Tidak hanya tersedia, alat dan kelengkapan tersebut haruslah bisa dipakai kapanpun dibutuhkan. Keberadaan sarana pendidikan menjadi percuma apabila ketika dibutuhkan tidak bisa digunakan. Jadi, alat dan kelengkapan pendidikan dalam kearifan lokal masyarakat Sasak (*beguru*) merupakan suatu keniscayaan, harus tersedia dan siap digunakan kapanpun.

Berdasarkan penjelasan prinsip ketersediaan & kesiapan di atas maka dapat dipastikan bahwa sarana pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan. Jika sarana menjadi komponen sistem pendidikan maka sudah pasti prasarana juga termasuk komponen dari sistem pendidikan. Dengan demikian, jika merujuk pada temuan tersebut maka komponen pendidikan tidak hanya terdiri dari unsur siswa, guru, dan kurikulum sebagaimana dikemukakan oleh banyak ahli selama ini, tetapi juga termasuk prasarana dan sarana. Kategorisasi prasarana dan sarana sebagai komponen sistem pendidikan menunjukkan betapa pentingnya keberadaan dan kesiapan sarana dan prasarana dalam pendidikan.

²⁴ Ibid

²⁵ Daniel Sampaio & Pedro Almeida, "Students' Motivation, Concentration and Learning Skills Using Augmented Reality", dalam Conference: 4th International Conference on Higher Education Advances (*HEAd'18*) At: Valencia, Spain, 2018, hal. 1559-1566.

²⁶ Erwiza & Sri Kartiko, "Factors Affecting the Concentration of Learning and Critical Thinking on Student Learning Achievement in Economic Subject" dalam Journal of Educational Sciences, 3(2), 2019, hal.205-215.

Temuan tentang urgensi prasarana dan sarana dalam pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cuyvers²⁷ yang menemukan bahwa prasarana dan sarana pendidikan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Siswa yang belajar di sekolah dengan prasarana dan sarana yang lebih baik melakukan pembelajaran dengan lebih baik dan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi. Temuan penelitian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barrett, et al.²⁸ yang menjelaskan bahwa prasarana dan sarana sekolah sangat menentukan kenyamanan siswa dalam proses pendidikan bahkan menentukan keberlanjutan pendidikan seseorang.

Berdasarkan temuan penelitian dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa prasarana dan sarana pendidikan merupakan komponen sistem pendidikan. Kategorisasi seperti itulah yang ditemukan dalam kearifan lokal masyarakat Sasak, *beguru*.

Kedua, prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau bidang ilmu merupakan pedoman dasar penyelenggara pendidikan dalam menyediakan sarana pendidikan dimana sarana yang akan diadakan harus mendukung terhadap bidang ilmu yang dibelajarkan. Dalam *beguru*, instrumen, media, dan perlengkapan pembelajaran lainnya (sarana) yang disiapkan selalu kompatibel dengan kebutuhan dan menyokong terlaksananya pembelajaran bidang ilmu. Dalam *beguru* tidak ada sarana yang ada tanpa manfaat. Semua sarana ada karena dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam *beguru*, efektifitas dan efisiensi sangat diperhatikan.

Urgensi dan kesesuaian sarana pendidikan bagi peserta didik sebagaimana prinsip dalam kearifan lokal masyarakat Sasak, *beguru* bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kapur²⁹ yang mengatakan bahwa sarana dalam pendidikan sangatlah penting dan setiap lembaga pendidikan harus menyiapkannya dengan baik. Sarana yang memadai akan berdampak pada kinerja dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam kaitan dengan kesesuaian sarana dengan peserta didik dan bidang ilmu Cuyvers et al.³⁰ berpandangan bahwa sarana yang kompatibel dengan peserta didik memberikan keuntungan yang baik bagi peserta didik baik dalam proses ataupun hasil pembelajaran.

²⁷ Katrien Cuyvers, et al. "Well-being at School: does Infrastructure Matter?", 2011, https://www.researchgate.net/publication/254439615_Well-Being_at_School_Does_Infrastructure_Matter

²⁸ Peter Barrett, et al., *The Impact of School Infrastructure on Learning*, (Washington: World Bank Publication, 2019).

²⁹ Radhika Kapur, "Infrastructure Development in Schools", 2019, hal. 1-13. https://www.researchgate.net/publication/334029594_Infrastructure_Development_in_Schools.

³⁰ ³⁰ Katrien Cuyvers, et al. "Well-being at School: does Infrastructure Matter?", 2011, https://www.researchgate.net/publication/254439615_Well-Being_at_School_Does_Infrastructure_Matter

Selain itu, sarana dalam *beguru* memiliki dua kategori, yaitu; sarana yang wajib ada dan sarana yang sebaiknya ada. Sarana yang wajib ada bersifat primer dan ketidakadaannya dapat menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya pendidikan atau pembelajaran. Artinya, tanpa adanya sarana yang dibutuhkan maka pendidikan atau pembelajaran tidak bisa dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan sarana yang sebaiknya ada adalah keberadaan sarana tersebut sangat menunjang berlangsungnya pendidikan atau pembelajaran tetapi ketidakberadaannya tidak menyebabkan berhentinya proses pendidikan atau pembelajaran. Jadi, keberadaan jenis sarana tersebut bersifat sekunder dalam pendidikan atau pembelajaran.

Kategorisasi sarana di atas lebih spesifik dibandingkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kapur³¹ yang hanya menganggap sarana pendidikan hanya bersifat sangat dibutuhkan (*indispensable*). Jenis sarana yang bersifat sangat dibutuhkan tersebut sama dengan kategori sarana yang sebaiknya ada di temuan penelitian ini. Keberadaan jenis sarana tersebut menurutnya berdampak pada kebahagiaan siswa dalam melakukan tugas tetapi belum tentu produktif. Dalam pandangannya tidak ada sarana yang bersifat prakondisi yang menentukan berlangsung tidaknya pendidikan atau pembelajaran.

KESIMPULAN

Ada tiga prinsip penyiapan sarana dan prasarana dalam kearifan lokal Sasak *beguru*, yaitu; prinsip kenyamanan dan ketenangan, prinsip ketersediaan dan kesiapan, dan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan atau jenis bidang ilmu. Prinsip-prinsip tersebut bersifat fundamental dan universal. Dikatakan bersifat fundamental karena prinsip-prinsip tersebut menjadi prakondisi terlaksana dan terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Sedangkan dikatakan bersifat universal karena prinsip-prinsip tersebut inklusif dan kompatibel dengan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan sifat-sifat di atas maka prinsip-prinsip *beguru* berkaitan dengan penyediaan sarana dan sarana pendidikan dapat menjadi *role of the conduct* setiap orang atau organisasi dalam memilih dan menentukan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut diharapkan penciptaan pendidikan dan pembelajaran yang baik dan berkualitas menjadi lebih mudah.

³¹ Radhika Kapur, "Infrastructure Development in Schools", 2019, hal. 1-13.
https://www.researchgate.net/publication/334029594_Infrastructure_Development_in_Schools.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. & Banurea, O. K. (2017). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Medan: CV Widya Pustaka.
- Astawan, I. G. (2018). “Pengembangan Model Pembelajaran Trikaya Parisudha untuk Meningkatkan Keterampilan Proses dan Nilai-nilai Karakter di Sekolah Dasar”. *Disertasi*. Pascasarjana UNY. Yogyakarta.
- Barrett, P., et al. (2019). *The Impact of School Infrastructure on Learning*. Washington: World Bank Publication.
- BPS. (2022). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. bps.go.id
- BPS NTB. (2020). Jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin, 2010-2020. ntb.bps.go.id.
- Cuyvers, K., et al. (2011). *Well-being at School: does Infrastructure Matter?* https://www.researchgate.net/publication/254439615_Well-Being_at_School_Does_Infrastructure_Matter
- Dewantara, K. (2013). *Kibajar Dewantara: Pemikiran, Konsep, Keteladanan, Sikap Merdeka, I, Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Djuwita, W. (2011). *Psikologi Perkembangan: Stimulasi Aspek Perkembangan Anak dan Nilai Kearifan Lokal melalui Permainan Tradisional Sasak*. LKIM Mataram.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model Miles & Huberman, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philipp Mayring, Program Komputer NVivo*. PT RajaGrafindo Persada.
- Erwiza & Kartiko, S. (2019). Factors Affecting the Concentration of Learning and Critical Thinking on Student Learning Achievement in Economic Subject. *Journal of Educational Sciences* 3(2), 205-215. <https://doi.org/10.31258/jes.3.2.p.205-215>
- Fadli, A., & Irwanto. (2020). The Effect of Local Wisdom-Based ELSII Learning Model on the Problem Solving and Communication Skills of Pre-Service Islamic Teachers. *International Journal of Instruction*, 13(1), 731-746. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13147a>.
- Fadli, A., & Masnun. (2020). The Earthquake Risk Management Model Based on Sasak’ Local Wisdom”, *Disaster Advances*, 13(3), 54-61. <https://www.journalguide.com/journals/disaster-advances>.

- Hainstock, E. G. (2002). *Montessori untuk Sekolah Dasar*. Terjemahan: Hermes. PT. Pustaka Delapratasa.
- Kapur, R. (2019). *Infrastructure Development in Schools*.
https://www.researchgate.net/publication/334029594_Infrastructure_Development_in_Schools.
- Martin dan Nurhayati, F. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methodes Sourcebook*. SAGE Publicationa, Inc.
- Rimbakita. (2019). Suku Sasak-Sejarah, Bahasa, Kepercayaan, Adat Istiadat & Kebudayaan. rimbakita.com.
- Sampaio, D. & Almeida, P. (2018). Students' Motivation, Concentration and Learning Skills Using Augmented Reality. *Conference: 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'18)* At: Valencia, Spain, 1559-1566.
<https://doi.org/10.4995/HEAd18.2018.8249>
- Simpson, D., Jackson, M. J. B., & Aycok, J. (2005). *John Dewey and the Art of Teaching: Toward Reflektive and Imaginative Practice*. California: Sage Publication, Inc.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Terjemahan: Misbah Zulfa Elizabeth. Ygyakarta: Tiara Wacana.
- Sumardi, L. & Hanum, F. (2019). Social Mobility and New Form of Social Stratification: Study in Sasak Tribe, Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 708-712.
- Sumardi, L. (2020). Why Students Dropout? Case Study of Dropout Attributions in West Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Cross-Currents: An International Peer-Reviewed Journal on Humanities & Social Sciences*, 6(6), 85-91.
- Sumardi, L. (2020). Pancasila: The Educational Philosophy Alternative from Indonesia for the World. *Journal of Education and Practice*, 11(11), 89-96.
<https://doi.org/10.7176/JEP/11-12-11>

- Sumardi, L., Wahyudiati, D., & Rohman, A. (2020). Does the Teaching and Learning Process in Primary Schools Correspond to the Characteristics of the 21st Century Learning? *International Journal of Instruction*, 13(3), 357-370.
- Sumardi, L. & Wahyudiati, D. (2020). Using Local Wisdom to Foster Community Resilience During the Covid-19 Pandemic: A Study in the Sasak Community, Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 556, 122-127.
- Sutrisno, H., Wahyudiati, D., & Louis, I. S. Y. (2020). Ethnochemistry in the Chemistry Curriculum in Higher Education: Exploring Chemistry Learning Resources in Sasak Local Wisdom. *Universal Journal of Educational Research*, 8(12A), 7833-7842. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.082572>.
- Zein, M. (2011). Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi, dan Literatur Keagamaan. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(01), 25-39.

Analisis 5C terhadap Keputusan Pembiayaan Musyarakah PT. Gerbang NTB Emas melalui Bank NTB Syariah pada Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB

Rahmansyah Abdul Shomad¹, Guruh Sugiharto²

PT. Gerbang NTB Emas, UIN Mataram, NTB, Indonesia

email: ²guruhsugiharto.business@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

PT. GNE is a company that owned by the NTB provincial government and therefore often becomes a business partner in various government programs. One of them is JPS Gemilang, which is assistance with basic food packages given to underprivileged communities affected by the Covid-19 pandemic. This program requires large funds which will be met through financing from Bank NTB Syariah. However, a number of requirements must be met, namely the 5C feasibility analysis. This study aims to analyze the efforts made by PT. GNE to be able to meet the 5C analysis criteria in financing by Bank NTB Syariah. This study uses a qualitative approach with data collection through observation, documentation and interviews. The sources of this research are the directors and managers of the company. The data analysis method used is qualitative data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the 5C criteria had generally been met through the character of a high commitment to pay off debts through budgeting in the RKAB. The company's capacity that always earns profits above 500 million for the last 3 years and a number of land assets owned in KLU. Capital through debt-to-equity ratio on average in the last 3 years is 18%, still in a safe level because it is still below 50%. Collateral is shown through the existence of land assets with HSGB which can be used as collateral and contract. Global economic conditions were affected by Covid-19 but not until a recession occurred so that banks were still able to channel their financing. A number of obstacles faced were the priority of paying tax debts, the existence of bad debts which had a composition of 57% of total current assets, land certificates that required appraisal and late consumer payments.

Keywords: 5C Analysis, Musyarakah Financing, PT Gerbang NTB Emas, Bank NTB Syariah, JPS Gemilang

ABSTRAK

PT. GNE merupakan BUMD milik pemerintah provinsi NTB dan karenanya sering menjadi mitra bisnis dalam berbagai program pemerintah. Salah satunya adalah JPS Gemilang, yaitu bantuan paket sembako yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Program ini membutuhkan dana besar yang akan dipenuhi melalui pembiayaan Bank NTB Syariah. Namun sejumlah persyaratan harus terpenuhi yaitu analisis kelayakan 5C. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan PT. GNE untuk dapat memenuhi kriteria analisis 5C dalam pembiayaan oleh Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Narasumber penelitian ini adalah direksi dan manajer perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa kriteria 5C secara umum telah terpenuhi melalui karakter dengan adanya komitmen tinggi untuk melunasi utang melalui adanya penganggaran dalam RKAB. Kapasitas perusahaan yang selalu mendapatkan laba di atas 500 juta selama 3 tahun terakhir dan sejumlah aset tanah yang dimiliki di KLU. Kapital melalui rasio utang dan modal secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 18%, masih dalam taraf aman karena masih di bawah 50%. Kolateral ditunjukkan melalui adanya aset tanah dengan HSGB yang dapat dijadikan agunan dan SPK. Kondisi ekonomi secara global

dipengaruhi oleh Covid-19 namun tidak sampai terjadi resesi sehingga perbankan masih dapat menyalurkan pembiayaannya. Adapun sejumlah kendala yang dihadapi adalah adanya prioritas pembayaran utang pajak, adanya piutang tak tertagih yang memiliki komposisi 57% dari total aset lancar, sertifikat tanah yang membutuhkan appraisal dan pembayaran konsumen yang terlambat.

Kata kunci: Analisis 5C, Pembiayaan Musyarakah, PT Gerbang NTB Emas, Bank NTB Syariah, JPS Gemilang

Submitted: 10 Januari 2022	Revised: 16 Maret 2022	Accepted: 3 Mei 2022
Final Proof Received: 12 Mei 2022	Published: 30 Juni 2022	

How to cite (in APA style):

Shomad, R. A., & Sugiharto, G. (2022). Analisis 5C Terhadap Keputusan Pembiayaan Musyarakah PT Gerbang NTB Emas Melalui Bank NTB Syariah Pada Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB. *Schemata*, 11 (1), 55-68.

PENDAHULUAN

Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua Warga Negara Indonesia Positif Corona. Dua WNI ini sempat memiliki riwayat kontak dengan warna negara Jepang yang positif virus corona. Berawal dari sini kemudian tidak hanya berdampak kepada sisi kesehatan, namun hampir kepada seluruh aspek kehidupan¹. Sektor ekonomi adalah sektor yang cukup terkena dampak serius dari pandemi Covid-19 ini, adanya pembatasan aktivitas masyarakat sangat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang minus 5,32 % pada kuartal II tahun 2020. Ditambah pula kebijakan penutupan tempat-tempat umum yang berakibat pada beberapa jenis usaha kehilangan konsumennya dan pada akhirnya melakukan penghematan jumlah pegawai. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020 akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.997 perusahaan di sektor formal memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampaknya².

Dampak ini pun dirasakan sampai ke daerah, salah satu perusahaan yang ada di NTB dan turut merasakan dampak dari Covid-19 tersebut adalah PT Gerbang NTB Emas. PT GNE adalah salah satu perusahaan milik daerah (BUMD) yang bergerak pada berbagai bidang diantaranya Industri Bahan Bangunan dan Manufaktur; Asembling, dan Perakitan Mesin; Penyewaan Alat Berat; GNE Property dan Perdagangan Umum. PT GNE sering

¹ CNN Indonesia. Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>. (2 Maret 2020).

² Kompas. Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>. (11 Agustus 2020).

menjadi mitra bisnis dalam beberapa program pemerintah. Program pemerintah paling terkini yang dikerjasamakan dengan PT GNE adalah JPS Gemilang. Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang adalah upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kurang mampu dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan paket yang disalurkan ke masyarakat berisi produk-produk hasil produksi IKM dan UMKM di NTB. Dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang timbul akibat Covid-19, melengkapi JPS Pemerintah Pusat³. Jadi, program JPS Gemilang ini merupakan kepanjangan tangan dari program pemerintah pusat. Dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I sebanyak 105.000 Keluarga Penerima Manfaat (Mei 2020), tahap II sebanyak 125.000 KPM (Juni 2020) dan tahap III sebanyak 120.000 KPM (Juli 2020).

Untuk dapat menjalankan program JPS Gemilang tersebut, PT GNE haruslah menyiapkan sejumlah dana yang cukup besar, sehingga pendanaan internal dirasa tidak memadai untuk pelaksanaan program tersebut. Melihat dari perspektif bisnis bahwa program penyaluran bantuan ini memiliki risiko yang relatif kecil terukur, artinya PT GNE hanya tinggal menjadi distributor saja. Membeli sejumlah produk dari mitra bisnis penyuplai yang telah ditentukan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Peluang yang cukup menjanjikan bagi sebuah perusahaan di saat iklim bisnis sedang memburuk karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu PT GNE kemudian bekerjasama dengan Bank NTB Syariah untuk mendapatkan pembiayaan.

Adapun dalam hal ini pembiayaan PT GNE menggunakan jenis akad *musyarakah*, pembiayaan dengan sistem kerjasama modal antara dua belah pihak beserta adanya pembagian hasil. Namun tentu saja ada sejumlah syarat yang harus dilalui oleh PT GNE agar dapat pencairan dana dari Bank NTB Syariah tersebut. Perbankan secara umum memiliki prinsip kehati-hatian, dimana sebelum menerima pengajuan pembiayaan nasabah, maka bank akan melakukan sejumlah analisis kelayakan. Pendekatan yang paling lazim digunakan untuk studi kelayakan tersebut adalah Analisis 5 C, yang mencakup *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*⁴.

Salah satu kendala yang dihadapi PT GNE dalam pengajuan pembiayaan tersebut adalah bahwa PT GNE belum pernah melakukan pinjaman dengan nominal mencapai 10

³ Dinas Kominfo NTB. JPS Gemilang. Diambil kembali dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat: <https://www.ntbprov.go.id/program-unggulan-ntb/jps-gemilang>. (2020, Desember 27).

⁴ Hanafi, M. M. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016): 483.

Miliar sebelumnya. Sehingga *track record* dalam hal pengajuan dan pembayaran belum dapat terlihat. Lantas, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh perusahaan PT GNE sehingga dapat memenuhi sejumlah persyaratan 5 C tersebut dan mengatasi setiap kendala yang dihadapi? Inilah yang kemudian melatarbelakangi penelitian ini dengan judul Analisis 5C Terhadap Keputusan Pembiayaan Perusahaan PT Gerbang NTB Emas Melalui Bank NTB Syariah Pada Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana yang bertindak sebagai instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dan pengumpulan data dapat dilakukan sebelum, pada saat dan setelah proses penelitian berlangsung secara keseluruhan⁵. Penelitian dilakukan bulan Februari-Desember 2021 bertempat di PT Gerbang NTB Emas Jalan Selaparang No.60 Cakranegara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pengamatan berpartisipasi (observasi partisipan), yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan dengan turut aktif selain menjadi subjek peneliti juga menjadi objek yang diteliti⁶. Dalam hal ini peneliti sendiri merupakan karyawan yang bekerja di PT Gerbang NTB Emas. Kedua, wawancara, yaitu komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber⁷. Narasumber yang dimaksud meliputi jajaran direksi dan manajer PT GNE. Ketiga, dokumentasi perusahaan berupa buku profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data karyawan, daftar produk dan harga, data penjualan dan data lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mencari dan menemukan pola tertentu, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁸. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah uji kepercayaan (*credibility*), keteraturan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*)⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis 5C

Character

⁵ Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bali: Nila Cakra, 2018):18-23.

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017): 145.

⁷ Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014):372.

⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2017):272.

Character menunjukkan kemauan peminjam untuk memenuhi kewajibannya yang terkait langsung dengan karakter atau sifat orang tersebut¹⁰. Indikator dalam karakter ini adalah *track record* atau pembayaran pinjaman sebelumnya. PT GNE sebelumnya pernah melakukan pinjaman di bank pada tahun 2018 dan konsisten melakukan pembayaran angsuran. Upaya yang dilakukan untuk membayar angsuran dan melunasi pinjaman tersebut dengan perencanaan, penganggaran, dan efisiensi. Tidak seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rosita, bahwa UMKM yang ada selalu mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan sehingga unsur karakter menjadi tidak terpenuhi¹¹. PT GNE memiliki iktikad baik untuk selalu membayar sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh pemberi dana. PT GNE melakukan proses budgeting (penganggaran) yang mengacu pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Belanja (RB) yang disusun setiap tahun. Efisiensi dan efektivitas kerja dan keuangan diterapkan untuk memudahkan pelunasan utang. Kewajiban perusahaan ini tidak hanya berkaitan dengan pihak perbankan tetapi juga pihak lainnya seperti perpajakan.

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan dalam niat baik pelunasan pinjaman adalah adanya hal prioritas lain yang harus didahulukan dan sangat mendesak, yaitu pelunasan utang pajak tahun 2016 dan 2017. Termasuk juga adalah masalah ketersediaan dana dikarenakan sebagian dana masih berbentuk piutang usaha yang belum tertagih. Perusahaan tidak hanya harus memiliki niat baik saja, namun juga kemampuan untuk merealisasikan niat baik tersebut. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada poin kapasitas. Untuk itu perusahaan harus mampu mengatur setiap dana yang dimilikinya dengan bijak sehingga masing-masing keperluan yang ada dapat terbayarkan tepat waktu.

Hal ini merupakan beban masa lalu, artinya utang pajak ini merupakan kewajiban pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah seharusnya terbayarkan lunas dan tidak menjadi kewajiban di tahun-tahun berikutnya. Pajak adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Pajak dibayarkan setiap tahunnya meliputi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas sejumlah barang yang perusahaan jual, maka 10% dari nilai jual tersebut akan disetorkan kepada kas negara sebagai bentuk pajak. Adapula pajak penghasilan yang dihitung dengan presentase tertentu setiap tahunnya berdasarkan

¹⁰ Hanafi, Manajemen Keuangan, 483.

¹¹ Rosita. *Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus BNI Syariah KCP Singkut)*. (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2019).

penghasilan atau laba yang diterima perusahaan.

Perusahaan sudah seharusnya menyiapkan dana khusus untuk pembayaran pajak ini dan menugaskan minimal satu orang staf khusus bagian pajak yang akan mengatur dan terus mengawasi segala macam bentuk administrasi perpajakan. Pajak yang sedang berjalan terus diatur sehingga dapat terbayar dan dilaporkan tepat waktu serta pajak yang belum terbayar di periode sebelumnya dapat diatas secara bertahap. Sehingga agenda-agenda lain perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh permasalahan klasik perusahaan ini.

Capacity

Capacity adalah kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban utangnya, melalui pengelolaan usaha yang efektif dan efisien. Indikator penting dalam kapasitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba¹². Kemampuan nasabah sangat dinilai di sini. Kemampuan dalam memanfaatkan setiap sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemandirian usahanya¹³. Berikut ini adalah data keuntungan perusahaan selama 3 tahun. PT GNE mendapatkan laba pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.512.254.933; pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.169.950.769; dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 872.536.823. PT GNE selalu mendapatkan keuntungan di setiap tahunnya. Walaupun terjadi tren penurunan laba sejak tahun 2017 hingga 2019, namun secara umum PT GNE masih mampu menghasilkan laba di atas 500 juta dalam setahun. Pada setiap akhir tahun perusahaan selalu melakukan rapat evaluasi untuk melihat apa yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan dan apa yang dapat diperbaiki dan disempurnakan lagi di tahun mendatang. Tentu saja penurunan laba ini akan menjadi bahan pembahasan bersama dan dicarikan solusinya. Sehingga dari tahun ke tahun perusahaan akan menjadi lebih baik dan hal ini juga sekaligus memastikan perusahaan dapat terus meraih keuntungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anoftrianandha S bahwasanya perusahaan harus selalu melakukan pengaturan (manajemen) keuangan yang baik, sehingga seluruh biaya perusahaan dapat tertutupi dan perusahaan masih memiliki sisa usaha yang akan menjadi laba atau keuntungan perusahaan¹⁴.

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam kemampuan membayar utangnya adalah

¹² Hanafi, Manajemen Keuangan, 483.

¹³ Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan*, 94-95

¹⁴ S, Anoftrianandha. *Analisis Aspek 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy) terhadap Keputusan Penyaluran Kredit pada Karyawan (Studi Kasus di Koperasi Pegawai "KOPEBI" Bank Indonesia Mataram. Mataram: (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).*

masih terdapatnya sejumlah masalah pada penagihan piutang perusahaan. Piutang ini adalah salah satu sumber pendapatan terbesar perusahaan. Piutang yang tidak tertagih ini dapat mengganggu *cash flow* perusahaan dan sedikit merusak alur rencana keuangan. Selain itu perusahaan juga memiliki kewajiban lainnya yang juga turut harus segera dilunasi sehingga perusahaan sangat dituntut untuk mampu membagi keuangan yang ada untuk dapat membayar ataupun melunasi seluruh utang-utang yang dimiliki.

Perusahaan berada pada satu kondisi dilematis, dimana jika perusahaan mewajibkan seluruh penjualan harus dalam bentuk tunai (pembayaran), maka di satu sisi perusahaan akan aman dan tidak memiliki piutang, namun di sisi lain perusahaan juga akan kehilangan konsumen. Karena konsumen mayoritas mencari penyuplai yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Penjualan produk di PT GNE seringkali bernilai besar, karena di dominasi produk beton untuk pengerjaan proyek tertentu. Proyek yang ada inipun menggunakan sistem pembayaran bertahap (termin), maka para kontraktornya pun membeli barang di penyuplai (PT GNE) secara bertahap (sistem termin).

Di sisi lain, jika perusahaan terus membolehkan sistem kredit ini kepada konsumen, maka risiko terjadinya piutang usaha sangatlah besar yang pada akhirnya justru merugikan perusahaan itu sendiri. Sehingga langkah yang dapat diambil perusahaan adalah tetap memberikan fasilitas pembayaran secara kredit, namun mewajibkan adanya uang muka di awal minimal 20%, hal ini untuk menjaga komitmen konsumen dalam pembayaran di tahap berikutnya. Pengiriman barang juga akan dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang telah masuk, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan. Data-data konsumen terus dikontrol sehingga pembayaran setiap terminnya sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Capital

Capital adalah posisi keuangan peminjam secara keseluruhan¹⁵. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki tanggung jawab atas usaha yang dijalankan dan merasa ikut menanggung risiko yang ada jika usahanya gagal¹⁶. Indikator penting dalam kapital ini adalah perbandingan utang dengan modal perusahaan. Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan melihat kesanggupan perusahaan untuk membayar utang berdasarkan ketersediaan modal yang ada. Artinya dengan modal yang ada dapat dipergunakan untuk dapat produktif dan mampu membayar segala utang yang dimiliki perusahaan. Posisi

¹⁵ Hanafi, Manajemen Keuangan, 483.

¹⁶ Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan*, 95

keuangan perusahaan saat ini dapat terlihat dari neraca perusahaan, yang menggambarkan rasio hutang terhadap modal pada tahun 2017 sebesar 15%, tahun 2018 sebesar 17%, dan tahun 2019 sebesar 23%. Berdasarkan data tersebut, bahwa rasio hutang terhadap modal PT GNE adalah sejumlah rata-rata 18% dalam 3 tahun terakhir.

Dengan modal tersebut perusahaan merasa sangat optimis bisa membayar utang yang ada, karena hampir seluruh utang perusahaan adalah utang produktif yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha. Modal perusahaan berasal dari penyertaan pemerintah provinsi NTB sebagai pemilik perusahaan. Namun tentu saja kehadiran modal ini tidaklah cukup dan harus ditambah dengan modal asing, yaitu pembiayaan dari perbankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anoftrianandha S, bahwa kapital berkaitan erat dengan sumber penghasilan atau uang masuk perusahaan, dimana uang masuk dapat berasal dari modal sendiri dan modal asing. Modal asing ini dapat diperoleh dari pembiayaan perbankan¹⁷.

Kendala yang dihadapi perusahaan dari sisi posisi keuangan adalah bahwa piutang usaha masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kas yang ada. Artinya sebagian besar uang perusahaan masih berada di tangan konsumen dan belum tertagih. Hal ini juga dapat berarti bahwa proses penagihan yang ada di perusahaan masih belum maksimal. Jika melihat dari data laporan keuangan yang ada, khususnya neraca tahun 2019, piutang usaha memiliki komposisi 57% dari total aset lancar yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau separuh lebih aset lancar perusahaan masih berupa piutang usaha. Uang masih ada di tangan konsumen dan belum tertagih. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi PT GNE untuk dapat menagih seluruh piutang usaha yang ada sehingga dapat membayar angsuran pembiayaan yang ada atau bahkan melunasinya.

Secara komposisi keuangan, khususnya dari sisi neraca, bahwa antara uang tunai berupa kas dan yang setara kas semisal piutang usaha harus berada pada komposisi yang sehat. Jumlah minimum dapat ditentukan berdasarkan rata-rata penggunaan uang kas pada periode sebelumnya. Sehingga jumlah uang kas tidak terlalu banyak, karena dikhawatirkan menimbulkan risiko yang lainnya seperti pencurian atau bahwan tidak efisien, karena jika disimpan dalam deposito bank misalkan tentu akan dapat menghasilkan pendapatan lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah piutang usaha. Piutang usaha harus dijaga dalam jumlah tertentu, jika sudah melebihi ambang batas yang ditentukan maka harus diambil tindakan korektif. Misalkan meningkat kerja tim penagihan piutang sehingga piutang tersebut dapat

¹⁷ Anoftrianandha, Analisis Aspek 5C

segera tercairkan dan dananya dapat digunakan untuk hal produktif lainnya misalkan untuk membayar utang yang ada.

Piutang macet yang sudah melebihi umur tertentu juga dapat diputihkan dengan melalui mekanisme perusahaan yang ada dan sesuai dengan kaidah akuntansi yang ada. Hal ini tentu berdampak negatif bagi perusahaan karena menganggap bahwa piutang tersebut telah terhapus, namun di sisi lain dari kesehatan laporan keuangan khususnya proporsi neraca akan terlihat sehat dan baik untuk perusahaan ke depannya.

Collateral

Collateral adalah aset yang dijaminakan untuk suatu pembiayaan¹⁸. Kolateral atau aset yang dapat dijadikan jaminan dalam pinjaman perusahaan adalah satu aspek penting dalam analisis 5C. PT GNE memiliki sejumlah aset, yaitu berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris kantor. Sertifikat tanah adalah aset perusahaan yang paling sering digunakan sebagai jaminan ketika mengajukan pinjaman/pembiayaan. PT GNE memiliki sertifikat tanah yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita, dimana unsur kolateral tidak terpenuhi dikarenakan skala usaha yang masih kecil, yaitu UMKM¹⁹. Aset yang dimiliki UMKM sangatlah terbatas sehingga cukup kesulitan untuk dapat memenuhi unsur kolateral ini. PT GNE termasuk perusahaan besar milik pemerintah dan memiliki sejumlah aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan/agunan.

Selain itu PT Gerbang NTB Emas juga memiliki Surat Perintah Kerja untuk pelaksanaan proyek JPS Gemilang tersebut. Artinya bahwa pelaksanaan proyek JPS Gemilang telah mendapat perintah resmi dari pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini tentu akan membuat bertambah keyakinan pihak pemberi modal, karena usaha yang dijalankan memang telah jelas rencana pelaksanaannya termasuk ketersediaan anggarannya dan rentang waktunya. Artinya jika telah sampai pada rentang waktu yang telah ditentukan anggaran yang ada akan cair dan dapat digunakan oleh PT GNE untuk melunasi pembiayaan yang ada.

Kendala yang dihadapi perusahaan dari sisi aset jaminan yaitu perbankan mensyaratkan adanya dokumen penilaian tanah (appraisal) untuk melengkapi sertifikat tersebut. Hal ini butuh proses yang tidak sebentar sedangkan perusahaan membutuhkan dana

¹⁸ Hanafi, Manajemen Keuangan, 483.

¹⁹ Rosita. *Analisis 5C*.

dalam waktu cepat. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak murah, sedangkan di satu sisi perusahaan membutuhkan pembiayaan dari perbankan dalam waktu yang cepat. Perusahaan seharusnya telah mempersiapkan hal ini sejak dahulu, sehingga ketika dibutuhkan dokumen yang ada sudah siap untuk digunakan. Apraisal tersebut sangatlah penting, karena nilai jual aset bisa berubah seiring dengan waktu dan pihak perbankan penting untuk mengetahui berapa nilai aset tersebut jika dijual atau nilai jualnya.

Kendala lainnya lagi adalah tidak semua aset tersebut dapat dijadikan agunan perbankan, karena perbankan sendiri tentunya memiliki perhitungan rasio atas besaran pembiayaan yang dianggap wajar atas jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Artinya tidak semua aset perusahaan dapat dijadikan agunan perbankan, karena bisa saja aset tersebut juga digunakan untuk keperluan yang lainnya. Aset yang dapat digunakan ini adalah aset yang merupakan hasil pembelian dari hasil usaha perusahaan dan bukan aset atas pelimpahan kekayaan terpisah yang didapatkan bukan dari hasil usaha.

Perusahaan memiliki cukup banyak aset selain tanah, misalkan ada mesin dan kendaraan. Namun hal ini pun tidak serta merta dapat dijadikan agunan karena kondisi mesin dan kendaraan dan nilai jualnya yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang perusahaan butuhkan. Perusahaan harus memiliki data aset yang baik, artinya aset tersebut diklasifikasikan tidak hanya berdasarkan jenis asetnya baik aset lancar maupun aset tetap, melainkan juga berdasarkan bahwa apakah aset tersebut dapat dijadikan agunan ke perbankan jika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan pembiayaan. Dengan begitu perusahaan sudah memiliki persiapan yang matang untuk operasional perusahaan ke depannya.

Condition

Condition adalah sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman²⁰. Selain faktor dari dalam perusahaan (internal), faktor luar (eksternal) perusahaan juga turut mempengaruhi perusahaan untuk dapat membayar pembiayaan yang dimilikinya. Salah satu hal yang cukup signifikan terjadi adalah pembiayaan dilakukan pada masa pandemi yang artinya kondisi bisnis secara umum pada saat tersebut sedang tidak dalam keadaan baik. Hampir seluruh proyek pembangunan fisik ditiadakan sehingga permintaan akan sejumlah produk berbahan beton menurun drastis dan berdampak kepada pendapatan perusahaan.

Selain itu, kondisi bank yang memberikan pinjaman tersebut juga menjadi faktor

²⁰ Hanafi, Manajemen Keuangan, 483.

penting dalam hal ini, secara umum kondisi bank saat pembiayaan dilakukan adalah cukup stabil sehingga mampu menyalurkan pembiayaannya. Namun menjelang akhir tahun beberapa perbankan sudah mulai menutup pembiayaannya karena target pembiayaan di tahun tersebut sudah terpenuhi. Secara umum kondisi perbankan cukup baik dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmi Utama, bahwasanya kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit²¹. Artinya dalam kondisi ekonomi yang cenderung stabil, maka pembiayaan perbankan masih sangat mungkin untuk dilakukan. Walaupun jika kita melihat kondisi ekonomi pada saat pandemi cukup turun, namun penurunannya tidak sampai mengakibatkan resesi ekonomi yang kemudian mengganggu stabilitas keuangan perbankan.

Kendala yang dihadapi perusahaan dari sisi kondisi ekonomi eksternal yaitu imbas dari pandemi Covid 19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini turut menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran dari *customer* dan cukup mempengaruhi perputaran keuangan perusahaan. Selain itu, secara umum kemampuan atau daya beli masyarakat selama pandemi menurun yang berakibat produk PT GNE sulit terjual dan mempengaruhi penjualan perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi yang terjadi turut membawa pengaruh kepada berbagai hal baik dari sisi kreditur, yaitu perbankan maupun debitur, yaitu perusahaan (PT GNE). Pihak perbankan sangat mengandalkan pendapatan yang ia dapatkan melalui berbagai sumber seperti bagi hasil pembiayaan yang disalurkan untuk berbagai bisnis atau usaha yang ada. Pada saat pandemi hampir segala sektor yang ada merugi atau bahkan ditutup seperti yang terjadi pada sektor pariwisata. Artinya debitur yang ada kehilangan pangsa pasar dan oleh karena menunda pembiayaan ke perbankan.

Debitur juga mengalami krisis keuangan, dimana kewajiban yang ada tetap harus diselesaikan sedangkan di sisi lain pendapatan perusahaan menurun drastis, karena secara umum daya beli masyarakat menurun. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh kepada seluruh pihak termasuk perbankan dalam hal penyaluran pembiayaannya.

²¹ Utami, Sri Rahmi. “*Analisis Pengaruh Kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) terhadap Risiko Kredit Mikro (Studi Empiris pada Seluruh Bank Konvensional yang terdapat di Kota Pekanbaru)*.” (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2016): 2034-2049.

KESIMPULAN

Secara umum, setiap perbankan akan selalu melakukan Analisis 5C sebagai bentuk perwujudan asas prudential atau kehati-hatian. Bahwa sebelum memberikan atau menyetujui suatu pembiayaan kepada nasabah, maka pihak bank sebagai pemilik modal akan melakukan penyaringan dan pemeriksaan mendalam tentang calon nasabah tersebut. Hal ini tidak lain ditujukan agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Pihak bank selalu melakukan ini setiap kali akan menyalurkan pembiayaan.

Analisis 5C menjadi hal wajib agar seorang nasabah bisa lolos verifikasi dan kemudian mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Analisis 5C meliputi lima hal pokok mencakup karakter, kapasitas, kapital, kolateral dan kondisi. Pada sisi kolateral, setiap nasabah yang ada dan berkeinginan untuk melakukan pembiayaan maka pihak bank akan mensyaratkan untuk memiliki sejumlah jaminan atau agunan berupa aset tertentu. Aset jaminan ini tentu nilainya harus sama atau bahkan lebih besar dari nominal yang dibiayai. Aset ini pula haruslah mudah untuk dijual, karena jika nasabah mengalami permasalahan dalam hal pembayaran angsuran atau dengan kata lain pembiayaannya macet. Maka aset tersebut akan disita oleh bank kemudian dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi sisa hutang yang ada.

Agunan berfungsi memperkuat keyakinan pemilik modal untuk menyalurkan pembiayaannya. Dalam kasus PT Gerbang NTB Emas tidak hanya kolateral berupa aset melainkan pula ada jaminan berupa Surat Perintah Kerja dari instansi terkait untuk menjamin bahwa program JPS Gemilang akan berjalan sesuai dengan rencana termasuk dari sisi anggarannya. Hal ini adalah satu temuan dalam penelitian ini bahwa kolateral dalam kasus ini tidak hanya berupa aset fisik saja melainkan pula dapat berupa aset non fisik seperti adanya penjaminan berupa Surat Perintah Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A CNN Indonesia. (2020, Maret 2). *CNN Indonesia*. Diambil kembali dari Jokowi

Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>

- Dinas Kominfo NTB. (2020, Desember 27). *JPS Gemilang*. Diambil kembali dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat: <https://www.ntbprov.go.id/program-unggulan-ntb/jps-gemilang>
- Hanafi, M. M. (2016). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kompas. (2020, Agustus 11). *Kompas*. Diambil kembali dari Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosita. (2019). *Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus BNI Syariah KCP Singkut)*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- S, A. (2020). *Analisis Aspek 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy) terhadap Keputusan Penyaluran Kredit pada Karyawan (Studi Kasus di Koperasi Pegawai "KOPEBI" Bank Indonesia Mataram)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Subagyo, A. (2021). *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Jakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nila Cakra .
- Utami, S. R. (2016). Analisis Pengaruh Kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) terhadap Risiko Kredit Mikro (Studi Empiris pada Seluruh Bank Konvensional yang terdapat di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2034-2049.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sri Wahyuni

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, NTB, Indonesia

email: unik.wahyuni06@gmail.com

ABSTRACT

The main focus of this study is the implementation policy of developing Human Resource Competences in West Nusa Tenggara Province. The substantial problems are as follows: (1) how the implementation of government policy in developing Human Resource Competences in West Nusa Tenggara Province?; (2) what kinds of factors support and resist of government policy implementation of Human Resource Competences in West Nusa Tenggara Province?; The theory that uses in this research is the policy implementation theory (by Edward III, 2002) consists of the communications dimension, sources, and disposition and structure of bureaucracy. The research method used is descriptive qualitative. The research subject was Per Gub NTB Number 52, 2020 with 29 of respondents consisting of Civil Servants at the managerial functional level and the university expert. The Data are collected through field observations, document review, and in-depth interviews with participants. The data then are triangulated and interpreted by connecting the data and theory. The results show the development of Human Resource Competencies in West Nusa Tenggara needs an implementation policy factor and also a need for strong commitment, supervision, coordination, and collaboration from stakeholders proportionally by creating BPSDMD as a one-stop training institution.

Keywords: human resource, policy implementations, competences's development

ABSTRAK

Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Substansi masalah diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat?; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat Teori yang dipakai sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan (Edward III, 2002:70) yang terdiri atas dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah implementasi Pergub 52 tahun 2020 dengan 29 responden yang terdiri dari Pegawai Negeri pada level manajerial dan fungsional, praktisi dan ahli dari akademisi. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam serta triangulasi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat selain memerlukan peningkatan faktor-faktor implementasi kebijakan dan juga membutuhkan komitmen yang kuat, supervise, koordinasi serta kolaborasi yang solid dari para pihak secara proporsional dalam mewujudkan BPSDMD sebagai lembaga pelatihan satu pintu.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kompetensi

Submitted: 29 April 2022	Revised: 9 Mei 2022	Accepted: 19 Mei 2022
Final Proof Received: 25 Juni 2022	Published: 30 Juni 2022	

How to cite (in APA style):

Wahyuni, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Schemata*, 11 (1), 69-88.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah melahirkan keterhubungan masyarakat dunia dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam hal budaya, sosial, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Kondisi kekinian ini juga mendorong persaingan, tidak hanya pada tingkatan individu ataupun korporasi, namun juga menyentuh tataran pemerintahan atau negara. Pada perkembangan era milenial dan reformasi birokrasi dewasa ini salah satu agenda terpenting pembangunan adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan profesional yang mampu melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien serta memberikan pelayanan prima kepada publik dengan tuntutan keseimbangan atas stabilitas dan agilitas pada era digitalisasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, sebagai salah satu komponen dalam birokrasi, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam fungsi penyiapan sumberdaya manusia menghadapi segala tantangan zaman, dituntut untuk agil, kreatif dan adaptif dalam menjalankan perannya. Berbagai upaya inovatif dilakukan guna memberikan layanan terbaik bagi pengembangan kompetensi sumberdaya manusia, salah satunya adalah dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga pelatihan melalui penataan regulasi dengan inovasi kebijakan manajemen pelatihan satu pintu. Sehingga pembenahan Sumber Daya Manusia menempatkan BPSDMD sebagai salah satu katalisator pelaksanaannya. Pengembangan SDM aparatur akan menjadi langkah yang sangat strategis untuk membentuk SDM aparatur sesuai dengan tuntutan kompetensi individu dan kebutuhan organisasinya. Terlebih lagi dengan telah diberlakukannya undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (pasal 21) yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 sebagai perubahan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap aparatur yang ada memiliki hak yang sama dengan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan pengembangan karir dalam jabatan mereka. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan, baik diklat pimpinan, teknis maupun fungsional.

Paradoksnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat terbaru pada tahun 2020 sebesar 68,25 berada pada level **sedang** dan menduduki peringkat 29 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan Harapan Lama sekolah 13,7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 7,31 tahun (BPS Provinsi NTB, 2020). Atau kalau dibahasakan lebih sederhana rata-rata masyarakat NTB baru bisa mengenyam pendidikan sampai SMP kelas 1 tujuh bulan. Dan kondisi ini memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia yang

dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika dianalogikan ke dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan Input, proses, output, outcome, benefit dan impact, maka NTB sesungguhnya baru berada pada capaian output saja. Kondisi inilah yang mendasari Pemerintah Nusa Tenggara Barat harus bergerak lebih sigap dan tangkas (*agile*) dengan membuat langkah dan lompatan strategis yang sinergis dan terukur melalui optimalisasi peran, kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing perangkat daerah yang dimilikinya. Dengan mengkolaborasikan sinergitas perangkat daerah yang kuat dan harmoni sehingga akan mampu menjadi *Leverage* atau daya ungkit yang kuat dalam peningkatan potensi dan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya sebatas sumber daya manusia aparatur saja, akan tetapi juga SDM non aparatur yang ada di provinsi NTB menuju IPM yang lebih baik.

Dengan demikian BPSDMD Provinsi NTB harus mampu untuk meneguhkan fungsi dan tugasnya menjadi katalisator dalam menggerakkan sistem pengelolaan pengembangan kompetensi SDM baik ASN maupun non ASN dalam rangka mewujudkan SDM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kompeten dan profesional menuju birokrasi yang berkualitas berkelas dunia melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan IPM yang mumpuni. Sehingga akan sangat penting bagi BPSDMD Provinsi NTB untuk terus menerus mengerahkan setiap potensi dan kemampuannya dalam mewujudkan tugas dan fungsinya melalui pengoptimalan peran seluruh subsistem yang ada melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang diawali dengan penataan dan penguatan regulasi dengan merujuk pada Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, PP nomor 33 tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, serta PP No 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Seperti diketahui bahwa potensi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah ASN yang berasal dari : (1) 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari 27 Dinas dan 8 Badan dengan jumlah ASN aktif sebanyak 13.805 jiwa, (2) ASN dari sepuluh Kabupaten dan Kota, (3) ASN dari kurang lebih 10 Intsansi atau lembaga vertikal yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan (4) potensi dari Non ASN yang membutuhkan fasilitasi pengembangan kompetensi dari BPSDMD Provinsi NTB.

Kenyataannya, BPSDMD Provinsi NTB masih belum optimal dalam pengelolaan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Hal ini terbukti dengan beberapa tantangan yang harus segera diantisipasi dan kenyataan sebagai berikut: Tantangan di era revolusi industri 4.0 menuntut kapasitas yang semakin kompleks dan dinamis bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB untuk

memperkuat tugas dan fungsi nya dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur di NTB melalui berbagai strategi yang tepat. Disamping tuntutan tersebut diatas, kondisi saat ini Provinsi NTB dengan posisi kekhasannya sebagai daerah kepulauan dengan heterogenitas budaya, adat dan agama serta letak geo-strategis nya di mata pada peta nasional dan dunia, juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan isu strategis yang harus segera diatasi secara mendasar dan komprehensif.

Pra kondisi ini menuntut BPSDMD sebagai salah satu motor penggerak dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM untuk terus menerus berbenah. Hal ini tentunya bukan hal mudah untuk dapat mewujudkannya. Terdapat banyak tantangan serta permasalahan yang harus dihadapi oleh BPSDMD dalam upaya pembenahan sumber daya manusia menuju ASN Profesional. Terlebih dengan adanya kewajiban BPSDMD untuk mengakomodir pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB sesuai dengan Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 (Pasal 21) yang kemudian diatur dalam PP nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (duapuluh) JP dalam 1 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka BPSDMD perlu melakukan pembenahan berkaitan dengan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang mencakup kepentingan internal dan eksternal, melalui pengembangan strategi penguatan lembaga pelatihan yang memungkinkannya dapat mewujudkan BPSDMD Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: menjadi lembaga pelatihan yang terdepan dalam bidang Pengembangan Kompetensi ASN, sebagai *think-tank* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, terdepan dalam *Human Capital Development*, sebagai lembaga Pelatihan yang *forward looking*, sebagai ujung tombak dalam studi/kajian penyusunan regulasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mewujudkan BPSDMD Provinsi NTB sebagai *Center of Excellence* dalam pengelolaan Pengembangan Kompetensi SDM menuju Lembaga Pelatihan Satu Pintu yang terintegrasi dan Mandiri.

Dalam upaya mencapai tujuan diatas, maka berbagai komponen atau aspek yang menjadi strategi dalam meningkatkan kapasitas lembaga harus dikelola, dilaksanakan dan dimonitor serta dievaluasi secara intensif agar betul-betul mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan itu sendiri. Adapun Komponen-komponen atau aspek-aspek yang dimaksud adalah : (1) Penataan dan penguatan Regulasi, (2). Penataan Kelembagaan (3). Pengembangan

Program Pelatihan dan Kurikulum, (4) Optimalisasi Pengembangan Manajemen *Learning System* and NTB *Cooperate University*, (5) Pengembangan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan, dan (6) Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan baik dengan perangkat-perangkat daerah teknis yang ada, Kabupaten/ Kota, lembaga-lembaga vertikal dan organisasi profesi dan kemasyarakatan yang membutuhkan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusianya. Dengan berjalannya seluruh komponen ini secara sistematis, terintegrasi dan simultan juga akan membantu membenahi dan menata BPSDMD Provinsi NTB menuju pelaksanaan *Learning Organization* (organisasi pembelajaran). Sehingga dituntut arah pengembangan sumber daya manusia yang benar-benar berbeda, lebih fleksibel, lebih cepat, pengurangan teknokratik dan birokratik sesuai kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasinya. Pada sisi lain, penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan juga harus berjalan seiring. Seperti yang diutarakan oleh Trost (2020:1):

“Employer branding had to be done suddenly and also talent management, active sourcing, talent communities and eventually candidate experience. In addition, the young generation Y seemed to be pushing for new themes: Work-Life Balance and an innovative, flexible working environment.”

Bahwa citra organisasi harus segera dibangun, demikian juga halnya dengan pengelolaan bakat dan kompetensi sumber daya, mengaktifkan sumber daya, *pool talent* dan pada akhirnya menemukan kandidat yang berpengalaman. Terlebih lagi generasi Y harusnya didorong untuk menuju tema dan gaya baru dalam bekerja: melalui keseimbangan antara pekerjaan dan gaya hidup, inovatif, dan lingkungan kerja yang fleksibel. Demikian juga halnya dengan pengelolaan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, selayaknya juga dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman dan karakteristik dari masing-masing generasi yang sangat spesial.

Diawali dengan strategi pertama tentang Penataan dan Penguatan kebijakan atau Regulasi Lembaga Pelatihan dalam hal ini BPSDMD Provinsi NTB, dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2020 ini sebagai tonggak yang akan mengawali dan mendasari kemajuan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas BPSDMD Provinsi NTB ke depan, maka dalam implementasinya sangat diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mengawal keterlaksanaannya melalui sosialisasi yang simultan, pengawasan, penerjemahan substansi Peraturan Gubernur ke dalam kebijakan dan regulasi yang lebih teknis sehingga bisa diwujudkan ke dalam bentuk program dan kegiatan nyata samapi dengan evaluasi, yang

akan mendasari BPSDMD dalam mengelola kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB secara sistematis dan holistik. Sehingga melalui penelitian ini berfokus pada mendapatkan gambaran sejauh mana implementasi awal Pergub Nomor 52 tahun 2020 ini dengan menggunakan analisa Model implementasi Kebijakan Edward III. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:102). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Peraturan Gubernur No 52 tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan tersebut selaras dengan penjelasan Seidman B. Robert (Sunggono, 1994:77), seperti berikut:

“Pembuat kebijakan hanya mempunyai satu alat yang dapat ia pakai untuk memengaruhi aktivitas pemegang peran, ialah peraturan-peraturan yang ia buat. Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan”.

Kebijakan yang sudah tersusun harus dilaksanakan agar memperoleh dampak yang diinginkan. Apabila suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak positif apa-apa, maka kebijakan tersebut bisa dikategorikan gagal (*unsuccessfull implementation*). Hoogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2005:42), membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori, yaitu *non implementation* dan *unsuccessfull* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Pengertian implementasi kebijakan dapat dilihat menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Suriadinata, 1994:42) menyebutkan bahwa implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana, tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Terdapat empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat berbagai faktor terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980:10), yaitu: faktor komunikasi (*communication*), sumber daya pelaksanaan (*reseources*), struktur biro-krasi (*bureaucratic structure*), dan sikap pelaksana (*dispotition*). Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:158) mengemukakan pendapat mengenai sikap pelaksana, yaitu:

“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya

bersifat **top down** yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Dari berbagai pendapat pakar tentang implementasi kebijakan, dalam menganalisis implementasi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, penulis merelevansikan dengan menggunakan pandangan Edward III tentang teori dan konsep implementasi kebijakan. Dimana ada empat faktor atau variabel yang menurutnya penting dalam implementasi sebuah kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, seperti dikemukakan (Edwards III, 1980, 9-10), bahwa:

”in our approach to the study of public policy implementation, we begin the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? In the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam rangka penelitian ini, penulis menetapkan 4 (empat) faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memerhatikan:

- Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

2. Faktor Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

- Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing masing unit;
- Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
- Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan;
- Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Faktor Disposisi

Faktor ini berkaitan dengan komitmen, dan sikap responsif yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dan stakeholders' yang dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- Efek disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
- *Staffing* birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
- Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 33 tahun 2018, Struktur birokrasi pemerintah provinsi dan dinas terkait di Kabupaten/Kota merupakan bagian tugas dan wewenang Gubernur dalam mengemban Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedures-SOP*), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam;
- Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksana kebijakan.

Eksisting fakta lapangan menunjukkan indikasi bahwa pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat belum terlaksana secara sistematis. Terbukti dengan beberapa kondisi diantaranya: 1).Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal; 2). Letak

geografis Provinsi NTB sangat unik dan khas. Dengan tuntutan industri 5.0, hadirnya KEK Mandalika, NTB sebagai AKLI 2 dengan kondisi IPM yang belum mumpuni menuntut pengembangan kapasitas, kapabilitas dan kualitas kompetensi SDM yang mumpuni.;3).Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian sampai dengan evaluasi monitoring pengembangan, Uji dan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia secara terintegrasi dan terpadu yang seharusnya diawali dengan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi. 4). Masih ter-fragmentasinya penyelenggaraan pelatihan pada unit-unit teknis; 5). Belum optimalnya peran lembaga Penjamin Mutu dalam menjaga kualitas pengembangan kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia, dan masih rendahnya Koordinasi dan kerjasama antar lembaga /unit kerja lingkup kabupaten/kota dan lembaga- lembaga vertikal di daerah dalam penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi; 6). Perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan; 7).Belum tersedianya Digitalisasi Informasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, minimnya pemanfaatan *Learning Manajemen System* dalam penyelenggaraan Pelatihan, belum optimalnya SARPRAS Digital dan Virtual dalam pengembangan *Learning Manajemen System*; dalam mewujudkan BPSDMD menjadi *Center of Excellence* sebagai langkah mendasar dalam pengembangan NTB *Corporate University* menuju Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*); 8). Secara umum alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan semua jenis diklat sangat minim sementara objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya.

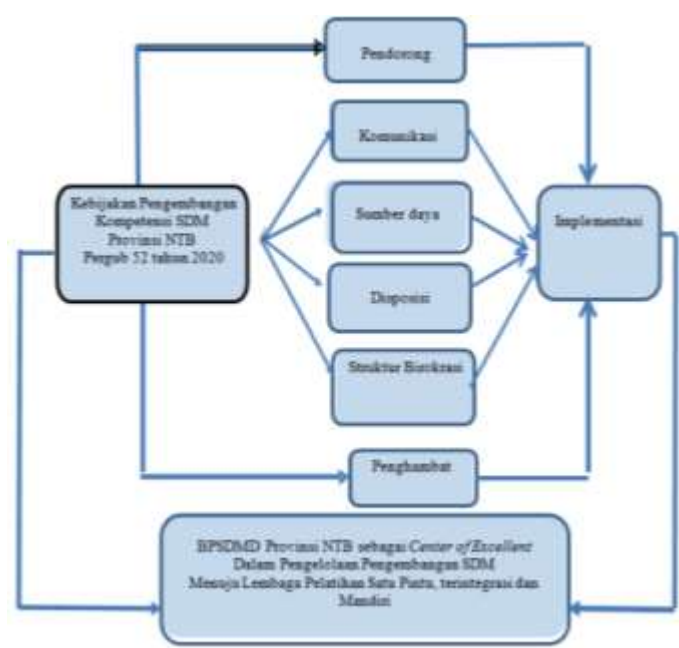
Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2). Untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia Provinsi NTB. Penelitian terkait implementasi kebijakan tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat masih relatif baru. Penelitian terdahulu umumnya menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bersifat *Top Down*. Penelitian dilakukan oleh Andi Arga Wirasandi dkk (2018), dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Penelitian oleh Muhammad Syafik dkk pada tahun 2017 dengan judul Reformasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi PNS Pasca Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Putra (2009) dengan judul Implementasi Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus di Kelurahan Sie Sikambing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi prgam Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Sie Sikambing B dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan P2KP di Kelurahan Sie Sikambing B berjalan baik. Masalah yang ditemukan dilapangan adalah paradigma masyarakat yang berfikir apatis dan pragmatis dalam menilai program ini.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Asna Aneta (2010) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan, tingkat responsivitas pemerintah, tingkat keberterimaan, dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.

Memperhatikan empat penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan fokus dan bahasan dengan penelitian sebelumnya. Hasilhasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa peneliatian dilakukan terhadap regukasi dan kebijakan yang bersifat *Top Down* dengan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Kesimpulan lainnya adalah paradigma dan komitmen serta aksi nyata dari para pelaksana kebijakan harus lebih dioptimalkan. Namun demikian, dari keempat hasil penelitian tersebut menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan kajian kelembagaan dari perspektif yang selama ini belum pernah dilakukan. Setidaknya penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan (*novelty*) yaitu adanya penelitian terkait kebijakan tentang system pengelolaan pengembangan komptensi sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur no 52 tahun 2020, yang bersifat bersifat *Buttom up* sebagai terjemahan dari perundang-undang dan regulasi diatasnya terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah yang dimilikinya. Dimana BPSDMD selaku *enumerator* sekaligus sebagai pelaksana kebijakan tersebut bersama-sama dengan stakeholder terkait

memiliki peran penting dalam mengawal keterlaksanaan dan implementasi kebijakan sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Kerangka berfikir penelitian ini tergambar dalam mindmap sebagai berikut sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang memusatkan pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan untuk melakukan generalisasi empiris terhadap fenomena- fenomena sosial. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisa dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu, penjelasan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran awal tentang implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Gubernur No 52 tahun 2020.

Data primer dan data sekunder digunakan pada penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi dan angket/questionaier. Pengumpulan data dengan panduan kuesioner dilakukan kepada 29 informan/narasumber yang terdiri dari pejabat dari lembaga pemerintah yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pengembangan kompetensi dan kelembagaan seperti

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum, BKD, Biro Organisasi, BAPPEDA dan BKPSDM Kabupaten/Kota. Narasumber lainnya adalah akademisi dan praktisi yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang penyusunan kebijakan dan hukum tata negara. Data penelitian juga diperoleh dengan melakukan wawancara dan diskusi melalui bersama narasumber yang relevan yaitu Kepala Dinas/pejabat dari instansi terkait lingkup

Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram, akademisi dan praktisi Hukum dari Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah. Selain itu, observasi langsung dilakukan langsung ke lokasi studi sehingga dapat diperoleh informasi dan gambaran komprehensif sebagai pembandingan antara fakta di lapangan dan pendapat yang diperoleh dari angket dan hasil wawancara.

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposif yaitu dengan memilih orang yang dianggap mengetahui secara jelas tentang materi yang berkaitan dengan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi, yang menjadi substansi dalam peraturan gubernur yang dibuat. Hal ini ditempuh dengan cara *snowball sampling* yaitu informan kunci menunjukkan orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya, selanjutnya orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan masih kurang jelas atau tidak memadai. Data sekunder diperoleh melalui metode penelusuran pustaka berupa peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis sedikitnya ada empat jenis analisis data yang dapat digunakan oleh seorang peneliti yaitu : (1) Analisis Domain, (2) Analisis Taksonomis, (3) Analisis komponensial dan (4) Analisis Tema Kultural. Analisis-analisis tersebut dilakukan secara simultan pada saat pengumpulan data di lapangan. Analisis ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan implementasi awal kebijakan serta factorfaktor yang mendoriong dan menghambat implementasi kebijakan.

3. HASIL DAN BAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB

a. Komunikasi

Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus di lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi

merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan. Kecenderungan jawaban responden pada indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi komunikasi masih perlu ditingkatkan. Menurut hasil wawancara dengan para pejabat yang berwenang di wilayah penelitian, proses komunikasi dilakukan melalui tahap sosialisasi awal sejak ditetapkannya kebijakan ini sampai dengan saat ini. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada pelaksana kebijakan dalam hal ini SKPD terkait namun juga pada seluruh *stakeholders* yang ada dan dilaksanakan pada setiap kesempatan seperti rapat-rapat koordinasi internal BPSDMD, rakor kediklatan dengan melibatkan BKD dan BKPSDM Kabupaten/Kota se- Provinsi NTB dan rapat-rapat lainnya, melalui Webside resmi Pemerintah Provinsi NTB, PPID dan mediasosial, BPSDM dan D Provinsi NTB dan melalui kegiatan. Namun demikian diakui bahwa intensitas dan sosialisasi secara detail dan holistic masih kurang optimal.

b. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Dalam implementasi kebijakan sistem pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Provinsi NTB, ketersediaan sumber daya manusia (staf) dari jumlah pelaksana kebijakan sudah mencukupi. Selain itu mereka juga memiliki keahlian dalam bidang tugas masing-masing, dan mengenai ketersediaan informasi di lingkungan pelaksana kebijakan masih kurang memadai. Untuk itu keaktifan dari masing-masing individu sangat dibutuhkan untuk mengakses informasi yang tersedia secara mandiri. Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam hal sumberdaya adalah wewenang untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam mempedomani Pergub 52 tahun 2020 sebagai landasan dalam pengelolaan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia, para implementor mampu untuk menjalankan sebuah wewenang secara efektif. Dan dari segi sarana dan prasaranapun sudah sangat memadai.

Berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa kurangnya latihan atau *training*, masa jabatan yang relatif singkat, terjadinya mutasi tanpa perencanaan dan alasan yang jelas, serta kesulitan untuk mempertahankan personil yang kompeten merupakan indikator lain yang memperkuat kurang terpenuhinya aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan.

Yang menjadi tantangan selama ini adalah terkait ketersediaan sumber daya anggaran operasional yang ditetapkan melalui APBD. Dukungan dana ini masih perlu dioptimalkan, dikawal dengan regulasi yang lebih ketat terutama dalam perencanaan pemanfaatan anggaran minimal 0,036 dari total APBD Provinsi dan 0,024 % dari Total APBD Kabupaten /Kota. Pada sisi eksternal, koordinasi dan kolaborasi OPD terkait seperti BKD, Biro Organisasi, Biro Hukum terkait pentingnya Manajemen Pelatihan Satu Pintu perlu lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten. Kecenderungan pada indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. Secara konseptual, kurangnya sumber daya akan berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980: 17) bahwa;

“.... lack of the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to ineffective”.

c. Disposisi (Kecenderungan atau Tingkah Laku Pelaksana Program)

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Pergub 52 tahun 2020 ini adalah kebijakan *bottom up* sebagai bentuk inovasi kebijakan sistem pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang diinisiasi sendiri oleh BPSDMD Provinsi NTB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga adanya komitmen dalam bentuk sikap kesiapan, kebersediaan dan kepeloporan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut menjadi modal yang sangat kuat.

Adanya komitmen pimpinan dan dukungan internal dan external yang terlibat dan instansi terkait yang mendukung dan memfasilitasi, kejelasan informasi yang juga mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan pada BPSDMD Provinsi NTB juga menjadi perhatian. Dimana orang-orang yang ada pada manajemen dan fungsionalnya adalah mereka yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Memaknai penerapan konsep disposisi sebagai pendekatan implementasi kebijakan sebagaimana telah dikemukakan para informan di atas, secara empirik memang telah dilakukan. Namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan, khususnya pemberian insentif yang

lebih memadai sesuai kebutuhan program- program, serta penerapan reward dan punishment yang memadai. Keterbatasan dana untuk melaksanakan kebijakan adalah salah satu penyebab sulitnya diberikan insentif materi kepada para pelaksana kebijakan. Insentif lainnya berupa pendidikan dan pelatihan, menurut pejabat yang berwenang telah dilaksanakan meskipun dalam jumlah yang terbatas. Namun program-program yang berkaitan dengan peningkatan keahlian dan mutu personal selalu dilakukan dan diikuti oleh hampir seluruh unsur pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan mengingat keahlian, baik yang bersifat substantif maupun manajerial sangat diperlukan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980):

”Skill, as well as numbers in important characteristic of staff for implementation, both substantive and managerial, needed to implement policies effectively”.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menjadi aspek keempat yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Adanya sumber hukum yaitu dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakannya dalam bentuk Keputusan gubernur tentang jam wajib Windyaiswara, MoU tentang kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi, Pedoman penyelenggaraan pelatihan teknis, Keputusan Gubernur terkait peran WI sebagai konsultan OPD dan mediator bagi non ASN serta dilengkapi struktur organisasi yang sangat mumpuni adalah faktor pendorong yang kuat dalam implementasi Pergub 52 tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar manual telah tersedia sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan program-program dapat dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit dan disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana. Namun demikian perlu adanya penyesuaian penyesuaian SOP sebagai upaya menyempurnakan pelayanan sesuai tuntutan zaman digitalisasi. Mengenai fragmentasi dapat dilihat dari jelasnya Prosedur Operasional Standar pada setiap program yang akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masing masing pihak yang terkait mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku serta berkomitmen dengan hadirnya kebijakan tersebut. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, seksi serta unsur-unsur pelaksana kebijakan diharapkan akan dapat mengeliminir timbulnya

hambatan hambatan koordinasi dengan institusi lain yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Dalam pelaksanaannya diakui memang tidak semudah itu, masih ada kendala-kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat.

Mencermati kondisi demikian, hambatan birokrasi, pembagian tugas maupun mekanisme pertanggungjawaban akan menyulitkan terlaksananya kebijakan secara efektif. Begitu pula dengan terbatasnya kewenangan akan menghambat dalam mengembangkan program-program terkait dengan pengembangan kompetensi. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selayaknya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dengan koordinasi yang efektif akan mempermudah pengelolaan kegiatan, pencarian sumber-sumber yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan kebijakan.

2. Faktor-faktor yang Pendorong dan Menghambat Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat faktor pendorong maupun penghambat. Faktor pendorong di antaranya adalah:

- Adanya Peraturan Gubernur no 52 tahun 2020 yang mendukung keterlaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara sistematis;
- Adanya potensi Jumlah Sumber Daya manusia ASN dan Non ASN di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 Kabupaten Kota yang ada serta lembaga vertikal yang ada di Provinsi NTB;
- Tersedianya 23 orang Widyaiswara yang mumpuni, tenaga pelatihan yang terqualifikasi serta lengkapnya Sarana Prasaran yang dimiliki oleh BPSDMD Provinsi NTB dalam menyelenggaraan berbagai jenis pelatihan, pengembangan, uji kompetensi sampai dengan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia ASN dan non ASN di Provinsi NTB

Adapun faktor penghambatnya diantaranya:

- Lemahnya respon dan komitmen pemerintah daerah dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat terkait pemanfaatan sumber daya anggaran pengembangan SDM yang sudah tertuang dalam APD;
- Tidak optimalnya pengejawantahan komitmen para pelaksana kebijakan dalam bentuk aksi nyata;

- Kurang responsifnya para penentu kebijakan dan DPR dalam menanggapi isu-isu strategis terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia provinsi NTB yang berimplikasi kepada kinerja birokrasi.
- Dan fragmentasi masih menjadi hambatan utama disertai kurang optimalnya kemampuan dalam membangun koordinasi dan akses antar pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan pergub 52 tahun 2020.
- Kurang responsifnya pelaksana kebijakan dalam menterjemahkan Peraturan Gubernur ke dalam kebijakan yang lebih teknis dalam bentuk Keputusan Gubernur, Bimbingan Teknis, Buku Pedoman, sampai dengan Keputusan Kepala Badan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai pendekatan Implementasi kebijakan pemerintah daerah belum terwujud secara ideal sehingga implementasi awal kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terlaksana secara optimal. Faktor pendorong pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB yakni dengan hadirnya Peraturan Gubernur no 52 tahun 2020 sebagai landasan hukumnya; Adanya potensi jumlah Sumber Daya manusia ASN dan Non ASN di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 Kabupaten Kota yang ada serta lembaga vertikal yang ada di Provinsi NTB; Tersedianya 23 orang Widyaiswara yang mumpuni, tenaga pelatihan yang terqualifikasi serta lengkapnya Sarana Prasarana yang dimiliki oleh BPSDMD Provinsi NTB dalam menyelenggaraan berbagai jenis pelatihan, pengembangan, uji kompetensi sampai dengan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia ASN dan non ASN di Provinsi NTB. Upaya-upaya yang dilakukan yang telah dilakukan BPSDMD Provinsi NTB dalam mendorong percepatan Implementasi kebijakan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ini adalah :

1. Menterjemahkan Peraturan Gubernur no 52 tahun 2020 ke dalam beberapa draft Keputusan Gubernur, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan.
 2. Terus menerus melaksanakan sosialisasi dalam setiap kesempatan yang ada.
 3. Membangun akses dan koordinasi yang lebih intens dengan stakeholders
 4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan implementasi kebijakan
- Berdasarkan simpulan diatas, maka direkomendasikan kepada:
- 1) Bagi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, hasil penelitian ini dijadikan alat bantu monitoring, control dan evaluasi dalam implementasi kebijakan

pusat terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan di Daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 2) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan sebagai kontribusi konsep pemikiran terkait kebijakan *buttop up* yang menterjemahkan regulasi di atasnya ke dalam kebijakan yang lebih khas dan spesifik sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing;
- 3) Bagi pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait dengan strategi penguatan kapasitas & kapabilitas kelembagaan melalui penataan dan penguatan Regulasi tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020. Kepala BPSDMD dan jajarannya beserta perangkat daerah terkait (BKD, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Bappeda) akan berdiskusi dengan Komisi satu DPRD atau dengan Pimpinan Dewan guna mendapatkan Rekomendasi penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Manajemen Satu Pintu.
- 4) Biro Organisasi, bekerjasama dengan BKD dan perangkat daerah lainnya bertugas segera melaksanakan evaluasi uraian dan rincian tugas Perangkat Daerah, melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja serta menghitung kembali kebutuhan personil yang nyata dan terukur serta menambah Indikator Kinerja Utama BPSDMD tidak hanya terkait pengembangan Kompetensi ASN saja, akan tetapi Non ASN juga menjadi cakupan IKU yang harus disertakan.
- 5) Bagi pengembangan kompetensi SDM. Terpenuhinya peningkatan kompetensi SDM ASN dan non ASN melalui pengelolaan pengembangan kompetensi yang terigrasi dan mandiri dengan manajemen pelatihan satu pintu. Dimana BPSDMD, BKD, Bappeda, Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan menterjemahkan tugas gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dengan merancang kolaborasi daerah dengan unit-unit lembaga pusat yang ada di daerah seperti: BOK, BPKP, Kemenkumham, BKKBN, Universitas/Kemendikti, TNI, POLRI, JATI PENGADILAN dll. Dengan dukungan kuat Biro Hukum yang akan merancang *legal formal* dalam bentuk regulasi;
- 6) Bagi pengembangan profesi widyaiswara. Sebagai salah satu persyaratan Widyaiswara Ahli Madya untuk naik ke jenjang jabatan Widyaiswara Ahli Utama dan Menjadi Referensi tambahan untuk diklat teknis *legal drafting*;
- 7) Bagi pengembangan keilmuan, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian terkait selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinkunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. H. (1998). *Quality Research for Education: An Introduction to Theories and Methods, 5th Edition*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Budi, (1989). *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Cascio, W. F. (2010). *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits*. New York: McGraw Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Dye, T. R. (2008). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward, George, C., & Ira, S. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politic and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeston University Press.
- Hampton, David, R., Sumer, Charles, E., & Webber, R. A. (1987). *Organizational Behavior and Practice of Management*. USA: Scott, Foresman and Company.
- Handoyo, Eko (2010). *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Press.
- Hessel, N., & Tangkilisan, (2003). *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta
- Hogwood, B. W. & Gunn, L. A. (1984). *Policy Analysis for the Real world*. Oxford University Press.
- Islamy, M., Irfan, D. R. (1997) *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lincoln, & Guba (1995). *Naturalistic Inquiry*. Hill CA: Thousand Oaks Sage Inc.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J., (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Owen, R. G. (1981). *Organizational Behavior in Education*. Eagle Cliff: New Jersey handbook.
- Pressman, J. L., & Aaron, B. W. (1973). *Implemtation: How grat expectations in Washington are dashed in Oakland*. 3rd edition. Berkeley: university of California Press.
- Riyanto, Y. (2003). *Penelitian Kualitatif*. SIC Surabaya.
- Robbins, S. P., (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Seidman, R. B., (1972). *Law and development, A general Model Law and Society Review*. USA: Madison.

- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*, UK: Doubleday.
- Subarsono, A. G., (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trost, Armin (2018). *Human Resources Strategies: balancing Stability and Agility in Time of Digitization*. Wiesbaden, Germany: Springer-Verlag GmbH Deutschland.
- University of Wisconsin
- Van, M., Donald, S., Van, H., & Carl, E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society*, 6(4), 445-485.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Winarno
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Regulasi

- 1) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Badan Kepegawaian Republik Indonesia.
- 2) Undang undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Undang undang no 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan
- 5) Pemerintah no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
- 6) Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah no 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- 9) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- 10) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2021 ttg Peran Jabatan Fungsional Widyaiswara pd Pembelajaran Di tempat Kerja;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 12) Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2020 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat